

PERAN ULAMA DALAM PRAGMATISME POLITIK

PADA PILGUB 2018

(Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh

EKA ZALIKA SALAMIAH

NPM. 1531040062



Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. Nadirsah Hawari, MA

Pembimbing II : Drs. Agustamsyah, M.IP

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2019 M

ABSTRAK

PERAN ULAMA DALAM PRAGMATISME POLITIK PADA PILGUB 2018

(Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)

**Oleh
EKA ZALIKA SALAMIAH**

Pemilihan Gubernur (PILGUB) merupakan rekrutmen politik oleh rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/wakil bupati atau Walikota/Wakil Walikota. Didalamnya terdapat berbagai persoalan dan dapat berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum. Salah satunya ialah pragmatisme politik sikap dari politisi dan masyarakat yang bersifat pragmatis yaitu menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai keuntungan dan kepentingan pribadi. Pragmatisme politik menganggap bahwa berpolitik merupakan cara mudah untuk meraih status sosial terhormat, kedudukan dan jabatan tinggi serta kemampuan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Bentuk-bentuk Pragmatisme Politik dalam Pilgub 2018 Kecamatan Sukoharjo, 2) Mengetahui Peran ulama dalam Menghadapi Pragmatisme Politik Terkait Pemilihan Gubernur 2018 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Metode penelitian jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, data yang diperoleh berupa data kualitatif sedangkan sumber diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Alat bantu yang digunakan berupa pedoman wawancara, dokumentasi, dan pedoman observasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian pada kajian Peran Ulama Dalam Pragmatisme Politik Pada Pemilihan Gubernur dapat disimpulkan bahwa: Peran serta ulama di politik bukan sebuah rahasia lagi. Hal ini tidak terlepas dari hak warga negara yang memang diperbolehkan untuk berkecimpung dalam dunia politik, Praktek kampanye hitam sangat sulit dihilangkan dari budaya kita. Hal ini disebabkan kurang tegasnya penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya. Persoalan mengenai harga diri dari masing pimpinan partai politik dalam meraih suara sebanyak-banyaknya juga menjadi persoalan serius yang mengakibatkan mereka terkadang melakukan berbagai cara untuk dapat memenangkan pemilihan umum. Pada kasusnya bentuk-bentuk pragmatisme politik yang terjadi di Kecamatan Sukoharjo ialah: Money Politik (Suap), Hanya Mendukung Pasangan Calon yang memiliki janji pendanaan tertentu jika didukung dan Pembagian Sembako. Peran serta ulama dalam membatasi pragmatisme pemilihan gubernur 2018 ialah: 1) Menjadi panutan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, 2) Pengawas dalam proses kampanye pada pemilihan gubernur, 3) Membantu meningkatkan kesadaran pemilih dalam pemilihan umum. Keikutsertaan pemilih dalam pemilihan kepala daerah menandakan semakin meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban politik sebagai warga negara.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Eka Zalika Salamiah

NPM : 1531040062

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Peran Ulama Dalam Pragmatisme Politik Pada Pilgub 2018 (Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”**, adalah benar-benar karya sendiri, bukan jiplakan karya orang lain, kecuali beberapa bagian yang disebutkan rujukan sumber didalamnya. Apabila dikemudian hari skripsi saya ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab dan saya siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Bandar Lampung , 15 Juli 2019
Yang Membuat Pernyataan,

Eka Zalika Salamiah
NPM. 1531040062



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDY AGAMA

Alamat: Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN ULAMA DALAM PRAGMATISME POLITIK
PADA PILGUB 2018 (Studi Kecamatan Sukoharjo
Kabupaten Pringsewu)**

Nama : **Eka Zalika Salamiah**
NPM : **1531040062**
Prodi : **Pemikiran Politik Islam**
Fakultas : **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam ujian munaqosah skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nadirsah Hawari, M.Ag
NIP.197406282008011013

Drs. Agustamsyah, M.IP
NIP.196801041994031003

Ketua Jurusan

Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP.197801302011012004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDY AGAMA

Alamat: JL. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PERAN ULAMA DALAM PRAGMATISME POLITIK PADA PILGUB 2018 (Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”** Disusun oleh, **EKA ZALIKA SALAMIAH, NPM : 1531040062**,
Program Studi : **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**, telah diujikan dalam sidang
Munagqosah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung
pada Hari/Tanggal : **Rabu/28 Agustus 2019**.

TIM/DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A** (.....)

Sekertaris : **Eska Prawisudawati Ulfa, M.Si** (.....)

Pembahas Utama : **Dr. Sidi Ritaudin, M.Ag** (.....)

Penguji Pendamping I : **Dr. H. Nadirsah Hawari, M.A** (.....)

Penguji Pendamping II : **Drs. Agustamsyah, M.IP** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

Dr. H. Afif Anshori, M.Ag
NIP. 196003131989031004

MOTTO

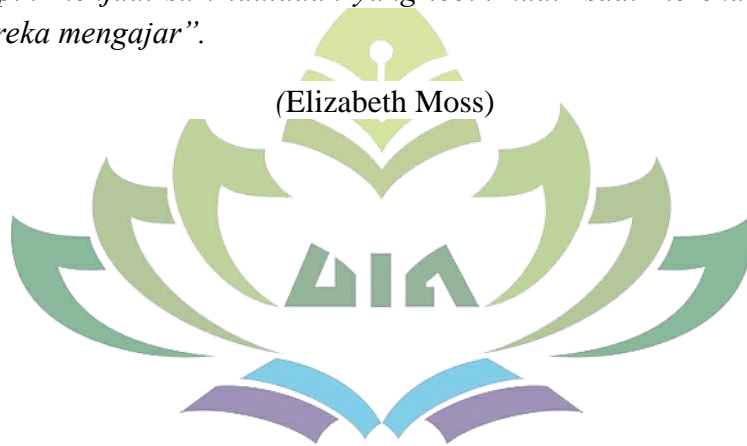
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin dikalangan kamu"

(QS. An-Nisa : 59)

"Pemimpin menjadi suri tauladan yang lebih kuat saat mereka belajar, bukan saat mereka mengajar".

(Elizabeth Moss)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, dan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW maka dengan tulus ikhlas disertai perjuangan dengan jerih payah penulis, Alhamdulillah penulis telah selesaikan skripsi ini, yang kemudian skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibundaku tercinta Bapak Zainal Arifin dan Ibu Imas Masyaroh yang telah melahirkaku kedunia dan membesarkanku sampai saat ini, yang telah memberikan segalanya untukku, memberi semangat, kasih sayang serta do'a tiada henti yang selalu menyertaiku. Karya ini serta do'a tulus kupersembahkan untuk kalian atas jasa, pengorbanan, keikhlasan membesarkan aku dengan tulus dan penuh kasih sayang.
2. Adekku tercinta Cindy Nur Fauziah ini semua berkat do'a, kasih dan sayang adik kepada kakaknya.
3. Keluarga besar Ajong Abdulloh dan Alm. Kakek Hj Ubad Badrudin yang selalu mendoakan, memberi support dan memberi semangat untuk keberhasilanku.
4. Seseorang yang sedang singgah di relung haiku Muhammad Fatchulloh, terimakasih semuanya yang pernah tercurah untukku dan yakinlah atas Ridho dan izin Allah SWT kita akan bersama.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti Eka Zalika Salamiah dilahirkan di Kertasari, tanggal 19 Maret 1997. Merupakan anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Zainal Arifin(Ayah) dan Imas Masyaroh(mamah). Peneliti menyelesaikan Pendidikan SD di SD Negeri Sukamulya 1 Kota Tangerang. Penulis melanjutkan pendidikan MTs dNurul Ilmi Cikupa Tangerang dan menyelesaikan pendidikan SMA Muhammadiyah 1 Pringsewu Lampung.

Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dan diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. selama Menjadi Mahasiswa Penulis Bergabung di Beberapa Organisasi Tahun 2015 bergabung di UKM Koperasi Mahasiswa (KOPMA) lalu pada Tahun 2016 tepatnya semester 4 penulis bergabung di salah satu organisasi kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pada Bulan Juli 2018 peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **“PERAN ULAMA DALAM PRAGMATISME POLITIK PADA PILGUB (Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu”**. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga dan pengikut yang taat pada ajaran-ajaran agama-Nya.

Skripsi ini di susun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Bandar Lampung dan Alhamdulillah telah dapat peneliti selesaikan sesuai dengan rencana.

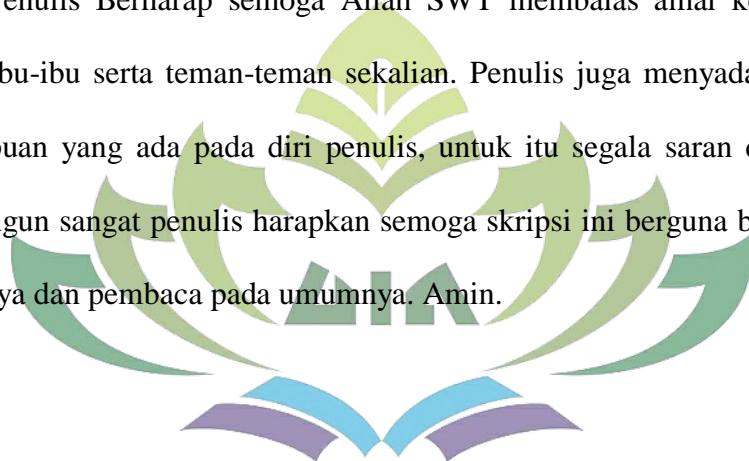
Dalam upaya penyelesaian ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, sehubungan dengan hal tersebut, maka melalui skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung dan Pembantu Dekan beserta Stafnya.
2. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si selaku ketua prodi pemikiran politik islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Dr. Nadirsah Hawari, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Agustamsyah, M.IP selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmunya, memotivasi, memberikan bimbingan dan pengarahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap karyawan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung serta seluruh staf yang telah banyak membantu, menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ketua dan Wakil MUI Kecamatan Sukoharjo, Tokoh Politisi dan Masyarakat di Kecamatan Sukoharjo yang penulis jadikan objek penelitian.
7. Teman-teman jurusan Pemikiran Politik Islam Andresti Sapitri, Nur Hayati, Aisyah Amini Tanjung dan semua teman-teman sejawat saudara Pemikiran Politik Islam terkhusus angkatan 2015 yang selalu membantuku dan menemaniku dalam keadaan suka maupun duka yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Kontrakan Tercinta yang selalu nanya kapan wisuda Rissa Ristiani, Tiara Virginia Jasmine, Yulia Melandari.
9. Musang Squad Coming Soon Veny Alvionita, Zesy Harviliyana Citra, Emilia susanti, Yuli Purwanti, Nilam Pelita Bhakti, Sandra Wijaya, M. Ilham, Fakrur Razi.

10. Squad KKN kelompok 95 Tanjung Bintang Lampung Selatan yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama KKN.
11. Himpunan Mahasiswa Islam Khususnya Komisariat Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung yang telah berhimpun dan berproses bersama. Semoga kanda, yunda, dinda selalu diringi dengan keberhasilan.
12. Almamaterku Fakultas Ushuluddin dan studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

Penulis Berharap semoga Allah SWT membalas amal kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian. Penulis juga menyadari keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis, untuk itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan semoga skripsi ini berguna bagi diri penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.



Bandar Lampung, 15 Juli 2019
Penulis,

(EKAZALIKASALAMIAH)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.	1
B. Alasan Memilih Judul.	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.	8
G. Manfaat Penelitian.	8
H. Metode Penelitian.....	9
BAB II PERAN ULAMA DALAM PRAGMATISME POLITIK PADA PILGUB 2018	
A. Ulama	16
1. Definisi Ulama.	16
2. Ciri-Ciri Ulama.	18
3. Fungsi dan Kewajiban Ulama	21
4. Tipologi Ulama.	23
B. Pragmatisme Politik	25
1. Definisi Pragmatisme Politik.	25

2. Perilaku Politik Perspektif Kepentingan Pribadi.....	27
C. Pemilihan Gubernur (Pilgub).	28
1. Pengertian Pemilihan Umum	28
2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum	29
D. Tinjauan Pustaka.	33

BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUKOHARJO DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sukoharjo.....	34
1. Sejarah Kecamatan Sukoharjo	34
2. Keadaan Geografis Kecamatan Sukoharjo.....	35
B. Gambaran Umum Kecamatan Sukoharjo	42
1. Deskripsi Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo	42
2. Visi Misi Kecamatan Sukoharjo.....	43
C. Ulama Kecamatan Sukoharjo.....	43
1. Sejarah Ulama Kecamatan Sukoharjo	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERAN ULAMA DALAM PRAGMATISME POLITIK PADA PILGUB 2018 (Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)

A. Bentuk-Bentuk Pragmatisme Politik Pada Pilgub 2018 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu	46
B. Peran Ulama Dalam Menghadapi Pragmatisme Politik terkait Pilgub 2018 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Rekomendasi.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Mengawali penyusunan skripsi dibutuhkan arah yang jelas agar alur penelitian lebih terfokus dan terarah. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami isi skripsi ini Penulis akan menyajikan judul skripsi dengan judul **“PERAN ULAMA DALAM PRAGMATISME POLITIK PADA PILGUB 2018(Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)”**, untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tersebut maka perlu kiranya penulis mempertegas dan memberikan penjelasan baik maksud maupun istilah-istilah yang terkandung dalam judul di atas secara rinci sehingga dapat di mengerti dan diminati untuk di bahas oleh pembaca.

Peran adalah bagian dari aktifitas yang dimainkan seseorang. Peran berarti bagian tugas yang harus dilakukan.¹ Dalam kamus besar bahasa indonesia, peran berarti beberapa tingkah laku diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat dan harus dilaksanakan.² Sedangkan Mc. Eachren, sebagaimana yang dikutip oleh David berry mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial.³

¹Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada,, 1997), h. 667

²Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 322

³N. Grass W. S. Masson and A. W. Mc. Echren, *Explorstion Role Analipsis*, dalam David Berry, *Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 99.

Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama islam, seperti ahli dalam tafsir ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa arab dan pramasastranya seperti saraf, nahwu, balagh dan sebagainya. Membimbing umat islam baik dalam masalah agama maupun dalam masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.⁴

Pragmatisme adalah perilaku politik yang pragmatis, kecenderungan perilaku politik pragmatis adalah merupakan kecenderungan seorang politisi dalam menjalankan aktifitas politiknya dengan berusaha mementingkan kepentingan dirinya sendiri dengan melakukan upaya-upaya pragmatis tanpa mau berpikir panjang.⁵

Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses atau menentukan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan tujuan yang mengenai apakah yang menjadi tujuan system politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternative dan penyusunan skala prioritas dan tujuan-tujuan yang telah dipilih itu, untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu dilakukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut peraturan dan atau alokasi dari sumber-sumber rourceus yang ada. untuk melaksanakan kebijakan itu perlu dimiliki kekuasaan dan keweangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.⁶

⁴Muhtarom, *Refroduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2005) h.12

⁵Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik* (Yogyakarta: Ruko Jambusari 7A, 2014), h.255

⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 367

Pragmatisme Politik sikap dari politisi yang bersifat pragmatis yaitu menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai keuntungan dan kepentingan pribadi. Pragmatisme politik menganggap bahwa berpolitik merupakan cara mudah untuk meraih status sosial terhormat, kedudukan dan jabatan tinggi serta kemampuan ekonomi. Politik bukan sebagai idealisme untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, berpolitik hanya sebagai mata pencaharian bukan untuk memperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi rakyat.⁷

Pemilihan Gubernur (PILGUB) merupakan rekrutmen politik yaitu penyelesaian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/wakil bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

Berdasarkan uraian dan keterangan di atas, bahwa yang di maksud dengan skripsi ini adalah penulis akan meneliti dan membahas bagaimana peran ulama dalam pragmatisme politik pada pilgub 2018 di kecamatan sukoharjo kabupaten pringsewu. Dimana Ulama sebagai orang yang dipercaya didalam masyarakat dan sebagai tokoh agama yang menjadi panutan yang benar. Maka dari itu ulama harus mencontohkan yang baik didalam ranah-ranah politik.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendasari penulis memilih judul **"PERAN ULAMA DALAM PRAGMATISME POLITIK PADA PILGUB 2018(Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)** adalah:

1. Penulis tertarik untuk mengangkat masalah ulama dan pragmatisme politik pada pilkada 2018 karena pragmatisme politik sering ditandai dengan

⁷<http://wikipedia.web.id/PragmatismePolitik>

praktek money politik sebagai gejala kebangkrutan moral, sementara ulama sebagai simbol kebaikan dan penjaga moral yang baik bagi kehidupan masyarakat, karenanya hal ini sangatlah menarik untuk diteliti.

2. Penelitian ini didukung dengan sarana dan prasarana serta literatur yang memadai sehingga memungkinkan penelitian ini dapat di selesaikan sesuai dengan waktu yang di rencanakan.

C. Latar Belakang Masalah

Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu berdasarkan data lapangan bahwa ulama di Kecamatan Sukoharjo Ulama ialah sosok pemimpin masyarakat dimana ilmunya sangat dijunjung oleh masyarakat apa yang ia katakan dianggap benar oleh masyarakat dan ulama di Kecamatan Sukoharjo bahwa ulama steril dari perpolitikan karena pada dasarnya ulama sebagai pebimbing moral didalam masyarakat dan dari itu ulama di Kecamatan Sukoharjo Sebagai pengontrol atau pengawas jalannya perpolitikan tersebut.

Di lihat bahwa Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, sudah menjadi suatu keharusan untuk tidak membatasi hak bagi siapa saja dan dari latar belakang apa saja untuk masuk ke dalam dunia politik. Hal inilah yang menjadi landasan utama semua orang untuk ikut berpartisipasi di dalam dunia politik mulai dari kalangan orang yang biasa saja hingga orang yang sangat dihormati. semuanya bisa antusias dan memiliki peluang untuk terjun dalam ranah-ranah politik sehingga di jaman ini ulama khususnya sangat berperan dalam dunia perpolitikan.

Ulama sebagai elite agama yang sekaligus sebagai pemimpin informal dalam sejarahnya selalu terlibat dalam kegiatan politik. Kegiatan itu tidak hanya dilakukan di kota, tetapi juga sampai di daerah pedesaan. Aktivitas politik Ulama tak jarang menimbulkan benturan antara mereka dengan pemerintah. Ada diantara mereka yang berpihak kepada pemerintah, dan ada juga yang berada pada posisi yang bertentangan dengan pemerintah. Kejadian inilah yang memelopori munculnya istilah ulama pemerintah dan ulama non pemerintah di dalam masyarakat.⁸

Sebenarnya persoalan agama dan politik sudah ada sejak dulu dalam sejarah Islam, sejak Nabi Muhammad wafat, para sahabat dihadapkan pada masalah tentang siapa yang pantas menjadi penerus Nabi. Sejak saat itulah persoalan agama dan politik mulai menjadi hal yang biasa dikait-kaitkan.

Orientasi para ulama adalah dengan menegakkan amar makruf nahi munkar. Konsep amar makruf nahi munkar dengan pengertian yang sangat luas yaitu sebuah pengawasan ulama dan evaluasi dalam pandangan ulama atau tokoh agama yang disebut kiai, konsep ini pun memiliki peran yang sangat signifikan, karena dalam kenyataannya di dunia politik yang ada banyak yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Mewujudkan sebuah kontrol kekuasaan yang menyimpang dari moral maupun ajaran agama.

Simaklah hiruk-pikuk masyarakat. Karena didorong oleh "nafsu", ambisi, keinginan, dan kepentingan tertentu (baik kepentingan politik-ekonomi maupun kepentingan pribadi di diri masyarakat), mereka rela menjadi "bamber" paslon tertentu.

⁸Imam Suprayogo, *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 51

Dalam dunia politik saat ini terjadinya money politik atau pragmatisme politik sudah tidak heran di masyarakat menjelang pemilu kada serentak. Hal ini sudah menjadi hal biasa dalam dunia perpolitikan di kalangan masyarakat yang ditandai sebagai money politik sedangkan ulama yang bertolak belakang sebagai pemuka agama. Sebagai ulama di dalam masyarakat tentunya sangat berperan di mata masyarakat untuk membimbing masyarakat di jalan yang benar dan tidak jauh dengan ajaran agama.

Pragmatisme politik yang sedang hangat di dunia politik saat ini hal yang wajar dilakukan, namun dilihat sekarang tidak ada masyarakat langka yang tidak ikut atau tidak memasuki politik praktis peran ulama lebih besar dan membawa perubahan dengan cara mengamati jalannya perpolitikan membimbing umatnya ke jalan yang benar menjauhi bingar-bingar politik yang kotor karena ulama sendiri sangat bertolak belakang dengan prinsip bahwa ulama benteng moral dan agama Islam ulama dapat melakukan peran sebagai pengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah.

Seperti yang terjadi di kecamatan Sukoharjo banyak masyarakat yang terjun dalam dunia politik, politik praktis contohnya pragmatisme politik yang ditandai dengan money politik, jabatan, janji politik, janji pekerjaan kepada masyarakat sedangkan ulama diantaranya KH. Sutarto, KH. Basori,. Sebagai pengamat adanya pragmatisme politik di masyarakat dengan peran ulama tersebut di dalam pragmatisme politik dengan cara mengurangi pragmatisme politik yang ditandai dengan praktek money politik di dalam masyarakat untuk mendukung salah satu paslon tertentu. Tentu saja hal ini merupakan permainan politik atau malah sekedar mencari popularitas belaka. Sungguh hal ini jauh

dari moralitas dan etika keagamaan. Namun memang sering terjadi, para calon itu melakukan sowan politik kepada masyarakat dengan harapan masyarakat tersebut mampu menggerakkan masyarakat lainnya. Dengan demikian, masyarakat lain tersebut condong dan mengarah kepada calon yang sowan ke masyarakat tersebut karena pengaruhnya money politik atau janji-janji yang disampaikan.⁹

Sehingga masyarakat tersebut memanfaatkan moment tersebut untuk kepentingan pribadi bisa juga untuk kepentingan kelompoknya dengan cara pragmatisme politik yang sedang hangat terjadi dalam pilkada berupa uang sembako atau lain sebagainya. Pragmatisme politik atau money politik yang selalu bertentangan dengan agama islam sehingga menarik untuk di teliti.

Keterlibatan masyarakat di dunia politik praktis (baik langsung maupun tidak langsung) harus diniati atau dimotivasi untuk menciptakan keadilan sosial, kemaslahatan umat, dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memenuhi ambisi politik-kekuasaan pribadi maupun untuk membantu mengembangkan ideologi dan ormas keagamaan tertentu.

Dari latar belakang tersebut sehingga peneliti tertarik untuk meneliti yang berjudul “Peran Ulama dan Pragmatisme pada Pilgub 2018KecamatanSukoharjo Kabupaten Pringsewu.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus membahas mengenai bagaimana peran ulama dalam pragmatisme politik pada pilgub 2018 di dalam masyarakat.

⁹Muhammad Amin MS,*Mengislamkan Kursi dan Meja; Dialektika Ulama dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: kerjasama pustaka belajar, 2009), h. 182

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk pragmatisme politik pada saat pilgub 2018 di kec Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ?
2. Bagaimana peran ulama dalam menghadapi pragmatisme politik terkait pilgub 2018 di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pragmatisme politik pada saat pilgub 2018 di kecamatan sukoharjo kabupaten pringsewu.
2. Untuk mengetahui peran ulama dalam meghadapi pragmatisme politik terkaitPilgub 2018 di kecamatan sukoharjo kabupaten pringsewu.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini pada hakekatnya berguna untuk :

1. Dari aspek keilmuan, hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang Peran Ulama dalam Pragmatisme Politik Pada Pilgub 2018 (StudiKec. Sukoharjo KabupatenPringsewu)
2. Dari aspek Praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi kepada Ulama dan Masyarakat dalam meningkatkan berpolitik yang benar dalam Agama.

H. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis,¹⁰ untuk mencapai langkah-langkah sistematis tersebut dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang sesuai, hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat berjalan secara sistematis sehingga mencapai hasil yang diharapkan, metode penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau medan terjadinya gejala. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis kualitatif yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.¹¹ Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data, informasi dan permasalahan yang ada di lapangan terkait peran ulama dalam pragmatisme politik pada pilgub 2018 di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

¹⁰Usman Husain, Purnomo Stiady, Amar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta Bumi Aksara, 2001) h.42

¹¹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.11

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian, penelitian ini pada dasarnya yang dilakukan bersifat deskriptif. Menurut Sutrisno Hadi penelitian yang bersifat diskriptif maksudnya adalah “orang semata-mata hanya melukiskan keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan secara umum. Dalam hal ini peneliti akan mengungkapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Peran Ulama Dalam Pragmatisme Politik Pada Pilgub 2018. Menurut Irawan Suhartono penelitian yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu.

Jamaluddin Rahmat dalam musa mengatakan bahwa penelitian deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, penelitian deskriptif dilakukan untuk:

- 1) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
- 2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi atau praktek-praktek yang berlaku.
- 3) Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam meghadapi masalah yang sama dan belajar dari mereka untuk menentukan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.¹² Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari objek penelitian yaitu Tokoh yang di anggap Ulama dan Masyarakat di Kec Sukoharjo Kab Pringsewu tahun 2018 melalui wawancara atau bukti-bukti lain yang peneliti kumpulkan langsung dari responden sebagai sampel yang telah ditetapkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan. Data sekunder disebut juga data yang tersedia.¹³ Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku, literature, karya-karya dan dokumentasi terkait objek penelitian.

Kedua data tersebut digunakan dengan saling melengkapi, karena data yang ada dilapangan tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan kepustakaan. Dengan menggunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

¹² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2002), h.81

¹³ *Ibid*, h. 8

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dimana ulama berjumlah 15 politisi atau politisi tersebut sebagai team sukses berjumlah 25 masyarakat PNS 515 Masyarakat mahasiswa/mahasiswi 275. Apabila seorang ingin elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi¹⁴. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat kecamatan Sukoharjo di Kabupaten Pringsewu

b. Sample

Sample adalah bagian atau wakil populasi yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Untuk mewakili keseluruhan populasi yang telah ditetapkan dalam sebuah penelitian ini maka diperlukannya sampel guna untuk menggambarkan keadaan populasi keseluruhannya supaya lebih mudah peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Atau dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Teknik penentuan sampel yaitu teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, penentuan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Ulama Sebagai Ketua MUI dan Wakil Ketua MUI Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu
- 2) Politisi Sebagai team sukses partai Golkar dan PKB Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Jakarta*, Rineka Cipta, 1998, h. 115

- 3) Masyarakat Pekerja sebagai PNS dan Mahasiswa Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini ada tiga cara yaitu :

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengajuan secara intensional atau bertujuan suatu hal, khususnya untuk pengumpulan data dan merupakan suatu verbalisasi mengenai hal-hal yang diamati.¹⁵ Dalam hal penelitian ini peneliti mengadakan langsung pengamatan terhadap lembaga tersebut, peneliti mendatangi langsung Kecamatan Sukoharjo, Ulama Kecamatan Sukoharjo, Masyarakat Sukoharjo dan Politisi Kecamatan Sukoharjo.

b. Metode Wawancara

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara Kuisioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh wawancara untuk memperoleh informasi oleh responden dan informan. Peneliti menggunakan interview terpimpin, yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederet pernyataan lengkep dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.¹⁶ Peneliti melakukan tanya jawab kepada ulama, politisi dan masyarakat. Untuk lebih mengetahui tentang peran ulama, pragmatisme politik dan pemilihan gubernur di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

¹⁵*Ibid*, h.157

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1998) h.145-146

Tabel1
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	KH. Sutarto M Idris	Ketua MUI
2.	KH. Basori Marwan	Wakil Ketua MUI
3.	Herman	Pegawai Negeri Sipil
4.	Indah Puji Rahayu	Mahasiswa
5.	Mastur Yani	Politisi partai Golkar
6.	Aida Puspita	Politisi partai PKB

Dalam sebuah wawancara dengan informan tersebut peneliti dapat mengetahui lebih lanjut mengenai informasi lebih yang kuat. Tidak kuat jika hanya dengan dilakukan observasi semata.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.¹⁷ Peneliti mengumpulkan informasi bagaimana peran ulama di dalam pilgub 2018 kemarin.

5. Teknik Analisis Data Kualitatif

Analisis data dapat digunakan penulis dalam penelitian karya ilmiah ini adalah analisa data kualitatif karena pendekatan kualitatif sangat menarik, sebab penulis langsung ikut serta di kegiatan yang sedang diteliti data yang dikumpulkan berupa konsep dan bukan angka yang bertujuan untuk memudahkan dan memahami data-data yang ditetapkan dalam penelitian. Selain melakukan analisa data, maka langkah selanjutnya penulis menarik kesimpulan kualitatif dengan mempergunakan cara berpikir induktif menarik kesimpulan dari khusus ke umum.

¹⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, (Gajah Mada University Press, 1998) h.133

Data yang akan peneliti analisis yaitu merupakan data kualitatif dan dengan cara menganalisis tersebut menggambarkan sebuah kata-kat dengan disimpulkan sedemian rupa, untuk menarik sebuah kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan oleh peneliti berangkat dari fakta atau peristiwa yang kongkrit atau jelas kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang khusus.



BAB II

PERAN ULAMA DALAM PRAGMATISME POLITIK PADA PILGUB 2018

A. Ulama

1. Defini Ulama

Ulama adalah mereka yang mempunyai kelebihan atau ahli dalam bidang ilmu dalam agama yaitu agama islam, seperti ahli dalam tafsir ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa arab dan yang lainnya seperti saraf, nahwu, balagh dan masih banyak lainnya terutama dalam bidang ilmu agama islam. Membimbing umat islam baik dalam masalah agama maupun dalam masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun masalah yang selalu ada dalam masyarakat karena ulama sebagai pembimbing moral¹⁸.

Ulama merupakan hamba Allah yang beriman bertaqwa menguasai ilmu kauniyah dan tanziliyyah, berpandangan hidup luas dan beribadah dengan landasan rasa takut kepada Allah karena kecintaannya terhadap Allah SWT. Takut merupakan sifat khusus ulama karena ulama adalah penerus nabi atau pewaris nabi.

Dimana Said bin juba'ir mengatakan bahwa khashyah merupakan rasa takut kepada Allah yang menghalangi seseorang dari perbuatan dosa kepada-Nya terutama ulama yang memiliki rasa takut kepada Allah.

Pendapat mufassir itu menunjukkan khashyah merupakan kriteria khusus bagi seorang ulama. Namun demikian, sulit menemukan kriteria

¹⁸ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2005)
h.12

ulama yang komprehensif atau jujur. Dikalangan umat islam, kata ulama menimbulkan berbagai persepsi namun bisa dijadikan satu persepsi sehingga belum ada definisi yang baku.

Clifford Geerts seorang antropolog menyebutkan ulama sebagai *cultural bloker* (perantara budaya) yang dalam hal ini dapat diidentifikasi menjadi empat hal utama. Yang pertama peran ulama dalam mengajarkan ilmu agama. Kedua sebagai *problem solver* yakni persoalan sosial. Ketiga peran ulama sebagai *agent of control* dari gerak laju perkembangan sosial dan kehidupan masyarakat dan yang terakhir adalah sebagai kata lisator yakni penghubung dari perubahan sosial itu sendiri.¹⁹

Menurut Ensiklopedia dalam Islam, Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT. sebagai tokoh islam, yang patut dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitar.²⁰

Musyawarah antar pimpinan pesantren tinggi (ama'badul ali al-islami), pimpinan pesantren se-indonesia merumuskan pengertian ulama sebagai berikut "Ulama adalah hamba Allah yang khasyyatullah, yaitu mengenal Allah secara hakiki dan secara benar. Mereka adalah pewaris nabi, pelita umat dengan ilmu dan bimbingannya yang diberikan terhadap

¹⁹Geertz Clifford, *The Religion of Java*, (Amerika Serikat: The Free Press , 1960)

²⁰Muhammad Nur Aziz, "Peran Ulama dalam Perang Sabil di Ambarawa Tahun 1945" (Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya), 24.

masyarakat. Mereka menjadi pemimpin dan panutan yang uswah hasanah yang baik didalam masyarakat dengan ketaqwaan dan istiqamah. Sifat ini menjadi landasan beribadah dan beramal saleh yang harus ditanamkan. Mereka bersifat benar dan adil serta tidak takut kepada celaan atau hujatan yang diberikan kepada mereka. Tidak mengikuti hawa nafsu dan selalu sabar menghadapinya, aktif menegakkan kebaikan, dan mencegah kemunkaran. Mereka tidak mau mengangkat orang-orang yang mau menjadikan islam bahan permainan semata dan senda gurau sebagai pemimpin mereka adalah pemersatu umat yang diutamakan, teguh memperjuangkan dan meninggikan islam, berjuang dijalan Allah, serta melanjutkan perjuangan rasulullah dalam mencapai ketidhaan Allah SWT.

2. Ciri-ciri Ulama

Kesimpulan seorang ulama sekurang-kurangnya harus memiliki kriteria:

Menguasai ilmu agama islam dan sanggup mebimbing umat dengan memberikan bekal ilmu-ilmu keislaman yang bersumber kepada al-quran, hadits, ijma, dan qiyas.²¹

Peran ulama merupakan pewaris nabi, sumber peta atau arahan bagi manusia yang ingin menuju jalan Allah SWT barang siapa mengikuti petunjuk mereka maka mereka akan selamat dunia akhirat, barang siapa yang dengan kesombongan dan kebodohan menentang ulama ia termasuk orang yang sesat dan celaka, para ulama adalah pewaris dan kekasih nabi,

²¹Badrudin Hsukby, *dilema ulama dalam perubahan zaman*, (jakarta: Gema Insan Press, 1995)

dialah manusia yang pengetahuan tentang Alla SWT selalu bertambah dan bertambah terus menerus mengetahui keagungan-Nya dan kekuasaannya-Nya. Maka dalam diri-Nya akan timbul rasa takut dan takzim makan keagungan dan ketinggian kekuasaannya. Rasulullah menerangkan kemuliaan ulama diatas manusia lainnya karena Allah telah memberikan tempat yang istimewa baginya.²²

Imam Al GhAzali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* mengemukakan Dua macam ulama didunia yaitu ulama akhirat dan ulama dunia (ulama su'), dengan rinci dia menyebut tanda tanda ulama dengan argumentasi absah. Tanda-tanda ulama akhirat adalah:²³

- a. Tidak mencari kemegahan dunia dengan menjual ilmunya, dan tidak memperdagangkan ilmunya untuk kepentingan dunia. (Q.S. Ali Imron : 199)
- b. Perilakunya sejalan dengan ucapannya dan tidak menyuruh orang berbuat kebaikan sebelum dia mengamalkannya. (Q.S. Al-Baqoroh:44)
- c. Mengajarkan ilmunya untuk kepentingan akhirat, senantiasa mendalami ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan pendekatan dirinya kepada Alloh SWT, dan menjauhi segala perdebatan yang sia-sia
- d. Mengejar kehidupan akhirat dengan mengamalkan ilmunya dan menunaikan berbagai ibadah
- e. Menjauhi godaan penguasa jahat, sabda Nabi SAW, “sejahat-jahatnya ulama ialah yang mendatangi penguasa dan sebaik-baiknya penguasa adalah yang mendatangi ulama” . (HR Ibnu Majjah)

²² Adnan Hasan Shalil Bajharits, *mendidik anak laki-laki, terj. Mas'uruliyatul abilmuslimi fi tarbiyail waladi mathalati athihufurullah*, cet. 2 (jakarta: Gema Insani, 2008), h.159

²³ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin* cet 1 (Semarang: CV.ASYIFA, 1990) h.15

- f. Tidak cepat mengeluarkan fatwa sebelum ia menemukan dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika ia ditanya suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya, ia menjawab, "saya tidak tahu"
- g. Senang dengan semua ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cinta kepada *musyadah* (ilmu yang menyingkap kebesaran Allah SWT), *muroqqobah* (ilmu untuk mencintai perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya) dan optimis terhadap RahmatNya
- h. Berusaha sekuatkuatnya untuk mencapai tingkat *haqqul yaqin*. Sabda Nabi SAW., "Yakin itu adalah tingkatan kesempurnaan Iman." (HR Baihaqi)
- i. Senantiasa *khasyyah* kepada Allah SWT, takdzim atas segala kebesarannya, *tawadhu'*, hidup sederhana, dan berakhlak mulia terhadap Allah SWT maupun sesamanya
- j. Menjauhi ilmu yang dapat membatalkan amal dan kesucian hatinya
- k. Memiliki ilmu yang berpangkal didalam hati, bukan diatas kitab. Ia hanya taklid kepada hal-hal yang telah diajarkan Rosul SAW.

Diatas segala-galanya salah satu peran ulama sebagai pemuka agama islam yang patut dicatat adalah posisi mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya berbagai lembaga pendidikan telah dilahirkan oleh mereka, baik dalam bentuk sekolah maupun pondok pesantren, lembaga-lembaga tersebut memiliki kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan tingkat melek huruf bangsa indonesia, baik dalam bidang agama, politik, sosial, pendidikan.

Pembentukan masyarakat muslim dan kelestariannya tidak dapat dipisahkan dari peran ulama. Sebaliknya masyarakat muslim memiliki andil bagi terbentuknya ulama secara kesinambungan.²⁴

3. Fungsi dan Kewajiban Ulama

Ulama merupakan pengalih fungsi ke-Nabian setiap ulama harus mampu mengemban misi para Nabi kepada seluruh masyarakat, dalam keadaan sangat sulitpun. Umat menegakkan islam pada setiap sisi kehidupan menuntut peran aktif dalam perjuangan, kesabaran, keikhlasan dan sikap tawakal. Tanggung jawab ulama yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak positif bagi kehidupan umat. Akan tumbuh semangat pembelaan terhadap islam disamping kesadaran pengalaman ajarannya.²⁵

Menurut Al-Quran, Ulama harus menjadi hamba Allah yang berfikir dan berdzikir. Ia harus menjadi pengajar Tauhid, pemberi penjelasan, pejuang kebenaran, dan sekaligus pemimpin ummat yang memelopori amar ma'ruf nahi munkar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi umat islam Jihad merupakan ajaran yang sangat penting, baik dalam pengalaman, pengembangan maupun pelestarian agamanya.²⁶

Beberapa kewajiban Ulama yang perlu dikembangkan secara sinambung meliputi:

a. Menegakkan Dakwah dan Membentuk Kader-kader Ulama yang baik:

²⁴ Rosehan Anwar dan Andi Bahrudin Malik, *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Islam*, (Jakarta : Proyek Pengkajian Dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003), h.13

²⁵ *Ibid*, h. 64-66

²⁶ Gugun El-Guyani, *Resolusi Jihad Paling Syar'I*, (Yogyakarta: PT LKS Printing Cemerlang, 2010), h. 55-57

- 1) Menanamkan Aqidah Islam dan membebaskan manusia dari segala bentuk kemusyrikan dan kesombongan.
- 2) Mengatur dan melaksanakan dakwah Islam, baik terhadap umat ijabah maupun umat dakwah, termasuk suku-suku terasing diseluruh plosok pedesaan dengan menyebar kebaikan.
- 3) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Islam secara menyeluruh tanpa tersisa termasuk ke pelosok pedesaan.
- 4) Membentuk kader-kader penerus Ulama demi eksistensi perjuangan dakwah Islam

b. Mengkaji dan Mengembangkan Islam :

- 1) Menggali nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.
- 2) Mencari gagasan baru yang islami untuk memperbaharui dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang islami jauh dari kemungkaran.

c. Melindungi Islam dan Ummatnya :

- 1) Memperjuangkan segala hal yang ada relevansinya dengan kepentingan umat Islam.
- 2) Melindungi kesucian umat Islam dari setiap rongrongan musuh Islam.
- 3) Memupuk rasa persatuan antara ummat Islam bila timbul perbedaan diantara mereka, apalagi perbedaan yang mengarah kepada perpecahan

Dengan demikian, hendaknya ulama giat mengatasi berbagai masalah sosial yang timbul. Misalnya, dengan memberantas kebodohan, kemiskinan, dan kemusyrikan²⁷.

Peranan ulama dalam kehidupan masyarakat beragama dalam memimpin dan membangun sebuah moral dan pemikiran yang agamis dikalangan masyarakat memang sangatlah menarik, demi terciptanya manusia yang utuh dalam memberi kemajuan dalam aspek lahiriah maupun batiniah. Dalam hal ini, keberadaan manusia yang akan dibangun terdiri atas unsur jasmaniah dan rohaniah. Pentingnya keterlibatan para pemimpin agama, dengan demikian, keterlibatan para pemimpin agama dalam kegiatan pembangunan tidak bersifat suplementar (pelengkap penderita), tetapi benar-benar menjadi salah satu komponen inti dalam sebuah proses pembangunan rohani masyarakat, tetapi juga dapat berperan sebagai motivator, pembimbing, dan pemberi landasan etis dan moral, serta menjadi mediator dalam seluruh aspek kegiatan pembangunan.²⁸

4. Tipologi Ulama

Sejak kelahiran Islam sampai dewasa ini, eksistensi Ulama tetap diakui. Namun demikian, pengertian Ulama yang baku belum ditemukan. Akibatnya, penggunaan kata ulama yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah masih sering ditemukan ditengah masyarakat.

²⁷Moch Eksan, *Kiai Kelana: Biografi KH. Muchith Muzadi*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), h.10-11

²⁸Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h.138

Ditengah masyarakat dewasa ini dikenal ada 5 macam ulama, yaitu ulama plus, ulama pulus, ulama dunia, ulama akhirat, dan ulama dunia akhirat. Sosok ulama yang terahir ini sangat dibutuhkan umat karena ia mampu menuntun masyarakat kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Meskipun peran ulama sangat penting, segolongan masyarakat berupaya mendiskreditkannya dengan berbagai macam cara. Mereka berusaha memperkecil perannya, bahkan sampai menghilangkannya sama sekali. Ada pula yang ingin menggeser kedudukan ulama dengan berbagai tindakan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Ironisnya mereka yang ingin menggeser ulama itu adalah ulama juga. Mereka berlaku dzalim pada diri mereka sendiri. Disebutkan dalam Firman Alloh SWT :

QS al fatir: 32

قَتَصِدُّوْهُمْ لِنَفْسِهِ ۖ ظَالِمٌ فَمِنْهُمْ عِبَادِنَا مِنْ أَصْطَفَيْنَا الَّذِينَ الْكَتَبَ أَوْرَثَانَهُ
الْكَبِيرَ الْفَضْلُ هُوَ ذَٰلِكَ ۖ اللَّهُ يَأْذِنُ بِالْخَيْرَاتِ سَابِقُومِنْهُمْ ۖ

Artinya: Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.

Menurut ayat diatas, Alloh SWT mewariskan Al-Qur'an kepada hambaNya kemudian menjadikan Tiga golongan ulama. Pertama, ulama yang menganiaya diri sendiri dengan tidak menjalani fungsi dan perannya. Kedua, ulama yang hidup sederhana dan istiqomah. Ketiga, ulama yang melopori kebaikan, membina masyarakat, dan mendorongnya untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh.

B. Pragmatisme Politik

1. Definisi Pragmatisme Politik

Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani *pragma* berarti perbuatan (action) tindakan (practice). *isme* berarti ajaran, aliran, paham. Dengan demikian, pragmatisme ajaran/aliran/paham yang menekankan pemikiran itu berarti mengikuti suatu tindakan, dalam kamus besar bahasa Indonesia, pragmatisme berarti kepercayaan bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (Paham/doktrin/gagasan/pernyataan dan sebagainya) bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Sedangkan pragmatis berarti bersifat praktis dan berguna bagi umum; bersifat mengutamakan segi kepraktisan atau kegunaan kemanfaatan yang ada; mengenai bersangkutan dengan nilai-nilai praktis.²⁹ Pragmatisme politik ditandai dengan money politik, jabatan, janji politik, janji pekerjaan janji politik maka dari itu pragmatisme politik dapat menjadi salah satu cara yaitu membaca suatu keadaan dinamika politik pragmatisme politik tidak mengenal suatu fanatisme ideologis dan sebuah kesetiaan kekal pada sebuah partai politik. Pragmatisme politik justru ruang dibuka sebesar-besarnya bagi setiap individu itu sendiri untuk memahami politik berdasarkan kepentingannya tersebut kemudian menjatuhkannya pilihannya tersebut sesuai masing-masing diri sendiri.

Pragmatisme merupakan salah satu penyakit politik (patologi politik) dan penyakit ini ternyata berkembangnya cukup pesat. *Conflict of interest* yaitu pertentangan kepentingan. Pada awalnya, waktu masih sebagai

²⁹Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1980), h.130-131

rakyat biasa, berkoar-koar ingin membela rakyat. Ironisnya, setelah berkuasa “niat”nya pun berubah. Sifat aji mumpung berlaku, dan kemudian muncul keinginan untuk melamggengkan kekuasaan, ingin menimbun harta, ingin mengajak kroni-kroni dan keluargadan lain sebagainya, sehingga timbullah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ditubuh Birokrasi pemerintah.³⁰

Pragmatis adalah suatu sifat, ciri yang menyatakan seseorang lebih cenderung bersifat praktis, terbingaki, dan kaku contoh: Apabila seseorang berencana atau memiliki sesuatu planning dalam kehidupannya misalnya masuk partai, aktif berorganisasi dsbny, namun punya tujuan yang jelas, sehingga tujuan yang ditetapkannya semula harus dicapainya dengan keterlibatannya langsung dan dengan sesegera mungkin dicapai tanpa mau menunggu proses atau melewati proses yang lama, apalagi berbelit-belit. Biasanya identik dengan orang yang prabayar selalu ingin simple opraktis sehingga kadang menjadi meleset dari sasaran awal, bahkan dapat menjadi bias, karena ambisius tadi karena umumnya orang yang pragmatis selalu sumber ambisius. Karakteristik lain golongan ini seperti ini juga cepet puas dan cepat bosan karena tidak melalui proses. Orang-orang yang memiliki sifat ini cenderung apabila misalkan ingin melakukan perubahan akan menempuh revolusi (perubahan secara cepat) bukan dengan evolusi) perubahan secara lamban.

Ide ini merupakan budaya dan tradisi berpikir amerika khususnya dan barat pada umumnya yang lahir sebagai sebuah upaya intelektual untuk menjawab problem-problem yang terjadi pada awal abad 20. Pragmatisme

³⁰M. Sidi Ritaudin, ”Kungkungan Patologi Politik Hancurkan Budaya Luhur Bangsa” *Jurnal TAPIS*, Vol.8 No.1 (Januari-Juni 2012), h. 2

mulai dirintis diamerika oleh charles. S Pierce yang kemudian dikembangkan oleh william james dan john dewey.

Ada beberapa kecenderungan perilaku politik dilihat dari perspektif kepentingan pribadi, yaitu:

Perilaku politik yang Pragmatis, kecenderungan perilaku politik pragmatis adalah merupakan kecenderungan seorang politisi dalam menjalankan aktifitas politiknya dengan berusaha memtingkan kepentingan dirinya sendiri dengan melakukan upaya-upaya pragmatis tanpa mau berpikir panjang. Perilaku politik cenderung berpikir pendek akal dan tidak mau berpikir implikasi politik yang akan timbul sebagai akibat dari keputusan politik yang diambil, lebih ironis lagi, bahwa pragmatisme politik sudah tidak murni lagi sebagai sebuah pikiran pendek akal, tetapi sudah cenderung digunakan untuk memberikan label kepada politisi yang tidak memiliki nuranidan mengobrol kepentingan rakyat untuk kepentingan pribadinya.³¹ Banyaknya pelaku yang terlibat, tentunya tidak didasari oleh satu faktor saja, misalnya faktor idiologi keislaman yang semakin meingkat, berbagai faktor saling bertumpah tindih didalamnya, antara kepentingan-kepentingan idiologis dan pragmatis. Baik para pelaku yang memiliki latar belakang keislaman maupun sekuler selalu membuat kalkulasi ditengah proses politik yang sedang berjalan. Dukungan tokoh-tokoh islam kepada agenda penerapan syariat juga tidak bisa dilepaskan dari motif-motif yang bersifat material. Pada pendekatan pilihan rasional (rational choice) yang

³¹ Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik* (yogyakarta: Ruko Jambusari 7A, 2014), h.255

mendasari perilaku politik, dimana kebijakan politik terkait erat dengan upaya maksimalisasi keuntungan politik (political benefits).³²

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya*

(Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu), artinya janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain (dengan jalan yang batil), maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi dan lain-lain (Dan) janganlah (kamu bawa) atau ajukan (ia) artinya urusan harta ini ke pengadilan dengan menyertakan uang suap (kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan) dengan jalan tuntutan di pengadilan itu (sebagian) atau sejumlah (harta manusia) yang bercampur (dengan dosa, padahal kamu mengetahui) bahwa kamu berbuat kekeliruan.

C. Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub)

1. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemilu merupakan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat.³³ Secara konseptual pemilu menurut Ibnu Tricahyo menyatakan

³² M. Zaki Mubarak, Iim Halimatusa'diyah, *Politik Syariat Islam Idiologi dan Pragmatisme* (Jakarta : Pustaka LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2014), h.187

³³ Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, S.Stp, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2015, h. 49

bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.³⁴

Pemilihan umum secara tehnik oprasional menurut para ahli diungkapkan oleh Umarudi Masdar yang mengartikan pemilu dari sudut pandang tehnik pelaksanaannya. Ia mengungkapkan bahwa pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat dan secara luas lagi pemilu menurut Adrew Reynold menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan yang diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.³⁵

Secara umum pemilu merupakan proses pemberian suara dari rakyat melalui pencoblosan secara langsung dimana suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan menjadi kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh kandidat yang menjadi penyambung lidah rakyat untuk pembuatan kebijakan negara.

2. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

a. Fungsi Pemilihan Umum

Adapun fungsi pemilihan umum menurut Rose dan Mossawir antara lain:

- 1) Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tak langsung, Kekuasaan merupakan hal yang sangat mempesona, karena

³⁴ *Ibid*, h. 50

³⁵ *Ibid*, h. 51

mempesonanya daya tarik kekuasaan sehingga untuk mendapatkannya harus melalui perebutan dan kompetisi dan tak banyak para pemburu kekuasaan cenderung menghalalkan cara untuk mencapainya. Pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab.³⁶

- 2) Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah, Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat publik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintah yang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerjanya dengan baik selama memerintah maka dengan ajang pemilu pemilih akan menghukumnya dengan tidak memilih calon atau partai politik yang sedang memerintah saat ini. Begitu sebaliknya jika pemerintah saat ini dirasa baik dalam memaikan roda pemerintahannya kemungkinan besar para pemilih akan memilih kembali calon atau partai politik yang sedang berkuasa agar dapat melanjutkan roda pemerintahannya.³⁷
- 3) Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka bisa kit mengukur seberapa besar dukunga rakayt terhadap mereka yang telah terpilih tersebut. Pengukuran tersebut dapat dilihat

³⁶ *Ibid*, h.54

³⁷ *Ibid*, h. 54

dari perolehan suara apakah mereka memenangkan dengan suara mutlak atau selisih suara . Semakin besar persentase perolehan suara dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.³⁸

- 4) Sarana Rekrutmen politik, Menurut cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dalam proses rekrutmen iniah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada.
- 5) Alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat, Sebelum melakukan pemilu, tentu para calon kandidat akan melakukan kampanye politik. Dalam masa kampanye calon akan menyampaikan visi, misinya yang akan dilaksanakan jika terpilih. Selain itu, pada masa ini rakyat juga menyampaikan tuntutan-tuntutannya sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

b. Tujuan Pemilihan Umum

Adapun tujuan pelaksanaan pemilu menurut Ramlan Subakti menyebutkan ada tiga yaitu :

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerinatah dan alternatif kebijakan umum (*Public policy*) dalam demokrasi. Sesuai dengan prinsip demokrasi bahwa rakyat yang berdaulat tetapi pelaksanaannya dilakukanoleh wakil-wakilnya. Oleh karena itu,

³⁸ *Ibid*, h. 54

pemilihan umum merupakan penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus ditempuh pemerintah biasanya menyangkut hal yang prinsipil beberapa negara menyelenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan umum.

- 2) Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.³⁹
- 3) Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.⁴⁰

Adapun menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip Khairul Fahmi, tujuan penyelenggaraan pemilu ada 4 yaitu :

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertip dan damai.
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat dilembaga perwakilan.
- 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

³⁹ *Ibid*, h. 55

⁴⁰ *Ibid*, h. 56

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai sebuah upaya dimana untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil skripsi yang ditulis permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka peneliti akan memaparkan karya ilmiah yang menjelaskan tentang pragmatisme politik dan menjadi sebuah acuan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

Skripsi dengan berjudul berjudul **“Kiai, Money Politik dan pragmatisme Politik Tahun 2009 Sebagai Upaya Pembentukan Kehidupan Poitik dan Beragama”** oleh Anas Azwar, Universitas Negeri Sunan Kalijaga tahun 2009. Perbedaannya dalam skripsi ini membahas mengenai Kiai Money Politik dan Pragmatime Politik Di Universitas Negeri Sunan Kalijaga.

Skripsi ini dengan berjudul **“Keterlibatan Ulama dalam Politik (Suatu Penelitian Terhadap Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh di Aceh Barat Daya)”** oleh Riva Rusda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Tahun 2014. Perbedaannya dalam skripsi ini membahas tentang keterlibatan ulama kedalam Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh di Aceh Barat Daya didasari oleh adanya rekrutmen oleh Partai Aceh dan Partai Daulat Aceh terhadap Ulama karena banyak memberikan keuntungan terhadap partai.

Pada skripsi yang peneliti susun tentunya akan berbeda dengan tinjauan pustaka diatas yang telah membahas kiai money politik dan pragmatisme politik dan ketrlibatan ulama dalam politik. Sedangkan pada skripsi ini peneliti lebih melihat mengenai peran ulama di dalam pragmatisme politik yang terjadi dimasyarakat dan macam-macam pragmatisme politik yang ada dimasyarakat

BAB III

GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUKOHARJO DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Sukoharjo

1. Sejarah Kecamatan Sukoharjo

Daerah Sukoharjomerupakan daerah yang mana pada awalnya merupakan daerah kolonialisme yang dibuka pertama kali pada tanggal 23 Agustus 1918 oleh serombongan kolonialisme yang berasal dari pulau jawa yang dipimn oleh Suharjo Wiryo Pranoto untuk rombongan pertama dan rombongan kedua dipimpin oleh suharjo wardoyo. Diaman nama Sukoharjo tersebut diambil dari dua nama tokoh tersebut. Kecamatan Sukoharjo pun Sudah bergantian camatbeberapa kali dari tahun 1970-sekarang:

DATA UMUM PROFIL KECAMATAN SUKOHARJO

LUAS WILAYAH : 6,737 Km

Jumlah KK : 12, 004

Jumlah Perempuan : 46, 372

Jumlah Laki-Laki : 23, 172

Jumlah Perempuan : 23,200

Jumlah Pekon : 16

SARANA PENDIDIKAN

Sekolah Taman Kanak-Kanak : 16

Sekolah Dasar/Sederajat : 37

Sltp/Sederajat : 6

Slta/Sederajat : 4

Perguruan Tinggi : -

SARANA IBADAH

Masjid	: 45
Mushola/Langgar	: 87
Gereja	: 6
Wihara	: 4
Wihara	: -

SARANA KESEHATAN

Rumah Sakit Rawat Inap	: 1
Puskesmas	: 1
Puskesmas Pembantu	: 5
Posyandu	: 47

PRASARANA JALAN

Panjang Jalan Provinsi	: 7 Km
Panjang Jalan Kabupaten	: 33,7 Km
Panjang Jalan Onderlogh	: 37 Km
Panjang Jalan Tanah	: 88 Km
Panjang Jalan Aspal	: 40,7 Km

2. Keadaan Geografis Kecamatan Sukoharjo

Keadaan Geografis dalam penelitian ini pun menyajikan tentang gambaran tentang letak administratif dan luas wilayah kecamatan sukoharjo.

a. Letak Administratif

Secara adminitratif Kecamatan Sukoharjo termasuk kedalam wilayah Kabupaten Pringsewu Kecamatan Sukoharjo terbagi kedalam 16 pekon.

Adapun yaitu batasan-batasan administratif Kecamatan Sukoharjo adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Adiluwih
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pringsewu
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banyumas
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran

b. Luas Wilayah

Kecamatan Sukoharjo terletak di daerah daratan Rendah. Luas wilayah Kecamatan Sukoharjo 6,737 Km. Adapun perincian penggunaan lahan adalah persawahan, ladang, pekarangan, perkebunan rakyat, kolam/empang dan lain sebagainya. Berikut tabel penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo.

Luas Kecamatan Sukoharjo Menurut Penggunaan Tanah Tahun 2015

NO	Penggunaan Tanah Ground Use	Luas (Ha) Wide (Ha)	Presentase Percentage (%)
1	Persawahan	11,82	16,20
2	Ladang	33,76	46,28
3	Pekarangan	9,97	13,67
4	Perkebunan Rakyat	14,47	19,84
5	Kolam Empang	0,17	0,23
6	Lainnya	2,76	3,78
Jumlah		72,95	100,00

Sumber : cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kecamatan Sukoharjo

Source : Agricultural and Food Crop of Sukoharjo Subdistrict

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa penggunaan lahan persawahan, ladang, dan perkebunan rakyat masih cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari setengah luas wilayah Kecamatan Sukoharjo (82,32%) dari luas wilayah Kecamatan Sukoharjo. Menunjukan bahwa

Kecamatan Sukoharjo memiliki potensi sumber daya alam yang cukup tinggi.

c. Keadaan Sosial Kecamatan Sukoharjo

Secara Sosial ekonomi letak Kecamatan Sukoharjo terhadap lalu lintas perdagangan cukup strategis. Hal ini dikarenakan jarak dari desa ke desa yang lain tidak jauh dari pasar dan jarak ke ibukota kabupaten hanya 10 km.

Kecamatan Sukoharjo berada dijalur transportasi dan dilalui oleh angkutan umum antar kecamatan/daerah/provinsi, sehingga memberikan kemudahan mobilitas orang dan barang

d. Keadaan Penduduk Kecamatan Sukoharjo

Keadaan Penduduk yang diuraikan dalam penelitian ini adalah semua yang terkait dengan keadaan penduduk yang ada di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu.

1) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat statistik (BPS) jumlah penduduk kecamatan sukoharjo adalah 47.217 jiwa. Data distribusi penduduk dibagi menjadi dua, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jumlah penduduk berdasarkan umur. Berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel

Distribusi jumlah penduduk Kecamatan Sukoharjo berdasarkan jenis kelamin

NO		Jumlah Penduduk	Presentase%
1	Laki-Laki	23,172	48,99%
2	Perempuan	46,372	51,01%
	Jumlah	47,217	100,00

Sumber : Koordinator Statistik Kecamatan Sukoharjo

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, data ini menunjukkan bahwa masyarakat kecamatan Sukoharjo memiliki sumber daya perempuan yang cukup tinggi dibandingkan laki-laki. Dari data tersebut juga dapat diperoleh (Sex Ratio) yang berarti bahwa di Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2015 setiap ada 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.

Data Monografi berdasrakan jumlah Kecamatan Sukoharjo berdasarkan umur dalam tabel sebagai berikut.

Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umum

NO	Usia (tahun)	Jumlah (jiwa)	Presentase (%)
1	0-6	2,497	5,29
2	7-12	3,875	8,21
3	13-15	4,381	9,28
4	16-18	5,898	12,49
5	19-26	8,469	17,94
6	27-25	6,837	14,47
7	56-59	9,864	20,89
8	60	5,397	11,43
	Jumlah	47,217	100,00

Sumber : Pekon dan Kelurahan se-Kecamatan Sukoharjo

Berdasarkan data dari tabel diatas penduduk berumur kurang dari 15 tahun cukup besar yaitu 22,78% ini perlu menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai. Jumlah usia produktif di Kecamatan Sukoharjo yaitu pada kelompok umur antara 15-59 tahun dengan komposisi terbesar yaitu 65,79%. Dan usia non produktif sebesar 11,43%. Ini membuktikan bahwa kecamatan Sukoharjo sangat beruntung karena memiliki usia

produktif yang cukup tinggi. Jad jika *dependensi* ratio di Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2015 adalah dalam 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung beban 51 orang penduduk usia non produktif. Artinya, bahwa dalam mencari nafkah atau usaha selain memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri, juga harus menanggung kebutuhan hidup orang lain.

e. Komposisi penduduk dalam kelompok Etnis/Suku

Berdasarkan jumlah etnis penduduk Kecamatan Sukoharjo adalah lima etnis/suku diantaranya lampung, jawa, sunda, batak, Palembang.

Berikut ini tabel komposisi penduduk dalam etnis/suku

Komposisi Penduduk Menurut Etnis/Suku

NO	Etnis/Suku	Jumlah	Presentase (%)
1	Lampung	7,183	15,21
2	Jawa	29,781	63,07
3	Sunda	3,796	8,04
4	Batak	1,429	3,03
5	Palembang	5,028	10,65
	Jumlah	47, 217	100,00

Sumber : Pekon dan Kelurahan se-Kecamatan Sukoharjo

Berdasarkan data di atas dapat diuraikan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Sukoharjo adalah etnis jawa, terdapat lebih dari setengah penduduk yang ada di Kecamatan Sukoharjo (63,07%) yang berjumlah 29,781 orang. Etnis lampung diposisi kedua dengan jumlah presentase 15,21% Etnis Palembang diposisi ketiga dengan presentase 10,65% yang berjumlah 5.028 orang. Etnis sunda di posisi keempat dengan presentase 8,04% yang berjumlah 3,796 orang. Penduduk minoritas etnis batak dengan presentase 3,03% yang berjumlah 1,429 orang.

f. Komposisi penduduk menurut agama

Komposisi penduduk kecamatan sukoharjo menurut agama dapat dilihat dala tabel berikut ini :

Komposisi Penduduk Menurut Agama

NO	Agama	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Islam	44,824	94,93
2	Kristen	560	1,18
3	Katolik	1,231	2,61
4	Hindu	571	1, 22
5	Budha	31	0, 06
	Jumlah	47, 217	100,00

Sumber : Pekon dan Kelurahan se-Kecamatn Sukoharjo

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Sukoharjo adalah pemeluk agama islam dengan jumlah hampir dari jumlah penduduk yang ada maka dari itu banyaknya ulama disukoharjo salah satunya yaitu didesa Keputran. Tempat peribadatan yang dimiliki Kecamatan Sukoharjo Masjid 57, Mushola 87, Gereja Kristen 6, Gereja Khatolik 5, Pura 4.

g. Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

Komposisi penduduk Kecamatan Sukoharjo Menurut Agama dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

Komposisi Penduduk Menurut Pekerjaan

NO	Pekerjaan	Jumlah (orang)	Presentase
1	Petani	11,073	35,94
2	Pedagang	6,490	21,06
3	PNS	515	1,67
4	Pengrajin	389	1,28
5	Peternak	863	2,80
6	Montir	20	0,06
7	Dokter	5	0,01
8	Bidan	29	0,09
9	Mantri	5	0,01
10	TNI/POLRI	45	0,15
11	Pensiunan	96	0,32
12	Swasta	548	1,79
13	Buruh	2,856	9,28
14	Sopir	128	0,41
15	Dosen	8	0,02
16	Buruh Tani	5,892	19,12
17	Lain-Lain	1,845	5,99
	Jumlah	30,807	100,00

Sumber : Pekon dan Kelurahan se-Kecamatan Sukoharjo

Berdasarkan dari tabel diatas mayoritas penduduk kecamatan Sukoharjo masi bermata pencaharian di bidang pertanian, baik itu petani maupun buruh tani. Pada tabel pun menunjukan bahwa 55,06% wilayah Kecamatan Sukoharjo dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan terdiri dari perkebunan kelapa sawit, cokelat, karet, dan kelapa dan sebagainya). Penduduk yang bekerja dibidang jasa mencapai 24,95%.

h. Keadaan Ekonomi

Kecamatan Sukoharjo sebenarnya memiliki banyak potensi dalam menunjang perekonomian masyarakat, seperti dibidang persawaha, ladang, perkebunan rakyat, pekarangan, peternakan, perikanan, dan bidang jasa (transportasi, industri dan perdagangan). Tetapi belum mampu dioptimalkan secara baik guna menunjang kesejahteraan masyarakat.

Data monografi Kecamatan Sukoharjo pada tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut :

Monografi Kecamatan Sukoharjo pada tingkat Kesejahteraan penduduk

NO	Keterangan	Jumlah (KK)	Persentase (%)
1	Sejahtera	9,744	74,65%
2	Sejahtera 1	3,309	23,35%
	Jumlah	13,053	100,00

Sumber : Pekon dan Kelurahan se-Kecamatan Sukoharjo

Dari data tabel diatas menunjukan hanya 74,6% untuk keluarga sejahtera. Hal ini menunjukan bahwa penduduk kecamatan Sukoharjo mampu dikatakan telah pada tingkat penduduk sejahtera. Penduduk pada tingkat sejahtera berjumlah 23,35%

B. Gambaran Umum Kecamatan Sukoharjo

1. Deskripsi pemerintahan Kecamatan Sukoharjo

Suatu pemerintahan baik desa maupun daerah memiliki sebuah struktur yang dibentuk sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintahan Kecamatan Sukoharjo tentunya dibuat untuk kemajuan dan pembangunan Kecamatan Sukoharjo.

CAMAT : BASRONI, SE

SEKCAM : Drs, JOKO HERMANTO, MM

DINAS / INSTANSI

KASI PEMERINTAHAN : SEPTI

KASI TRANSTIP : ROHADAN, SE

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN : YAZID

KASI PELAYANAN : SUPRIYADI, SH

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN : ERLY YUNIARTI, SE

Sumver : Kantor Camat Kecamatan Sukoharjo

2. Visi Misi Kecamatan Sukoharjo

- a. memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan.
- b. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- c. mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dan industri serta pengelolaan potensi daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- d. meningkatkan kualitas kehidupan bergama dan bermasyarakat.

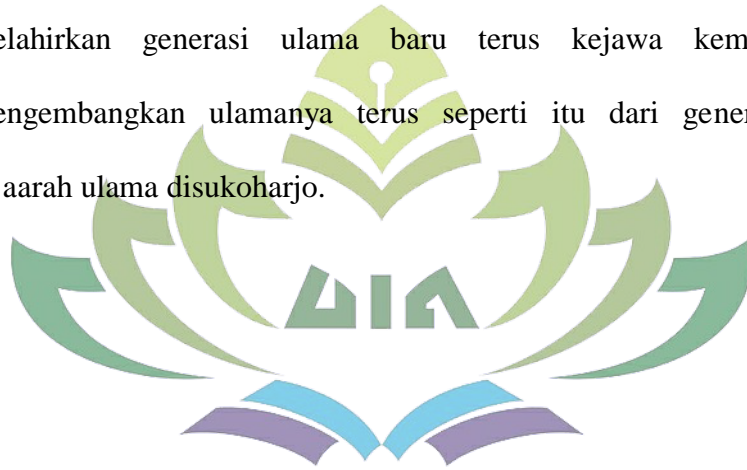
C. Ulama Kecamatan Sukoharjo

1. Sejarah Ulama Sukoharjo

Sangat mudah memang menjadi ulama di lampung ini memakai peci, memakai sorban, pintar berdo'a, pintar berdawah berpakaian layaknya seorang ulama disebut sebagai ulama padahal yang dimaksud dengan ulama sesungguhnya yaitu daripada jama' alim maksudnya yaitu jadi ulama yang menguasai ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu maupun ilmu umum karena ilmu itu milik Allah SWT kalo ulama sudah pasti memiliki ilmu agama yang kuat syukur-syukur ilmu umum pun mendalaminya, ulama atau kiyai-kiyai di Jawa Timur mencetak ulama itu menguasai ilmu agama menguasai ilmu juga beberapa persen saja sudah cukup. Orang penceramah belum tentu menguasai ilmu agama dan ulama sebetulnya juga belum tentu mereka bisa berceramah atau berdakwah banyak orang yang pintar atau ilmu pengetahuannya luas tetapi mereka tidak bisa berceramah. Rasulullah SAW pun berpolitik dengan cara mengembangkan politik siyasat.

Khusus Kecamatan Sukoharjo dahulu ada dua kelompok manusiawi pertama kelompok STN kedua kelompok BRN adalah dimana orang-orang tersebut dikerjakan pemerintah untuk membuka hutan lampung khususnya Kecamatan Sukoharjo Bandung Baru dan Siliwangi. Mereka dahulu pernah sebagai pejuang 45. Karena pejuang 45 mereka tidak mampu membiayai akhirnya dibekali 7 perang dibawah peti isinya senjata dan peti itu sampai saat itu masih ada di ketua MUI Kecamatan Sukoharjo dimana peti itu pada tahun 50an setelah indonesia merdeka karena paman ketua MUI Sukoharjo STN juga setelah dibuka ternyata peti itu berisi campak, cangkul, sabit itulah senjata untuk memerangi hutan dan disitu juga kebetulan ada ulamanya ada yang menguasai juga ada juga disamping mereka membuka hutan mereka yang mempunyai ilmu agama disamping itu juga mereka mengajar ngaji dikarenakan anak-anak ngaji dan akhirnya mereka disuruh mondok ke jawa pulang menjadi kiyai atau yang disebut dengan ulama terus turun temurun sampai sekarang, Pak Sutarto juga diajar oleh orang STN juga begitu sudah selesai tingkat desa pak tarto disuruh ke jawa pulang dari jawa pak sutarto buka pesantren dirumahnya termasuk ulama-ulama sekarang di daerah Sukoharjo dulu mengaji tempat pak Sutarto begitu taman Imriti ke jawa kembali menjadi Kyai mendirikan pondok yang salah satunya pondok di daerah Keputran yaitu pondok Al-Hidayah. Ulama-Ulama dahulu yaitu asal dari CTN yang dimaksud dengan CTN yaitu (Cadangan Tentara Nasional), BRN (Biro Rekontruksi Nasional). BRN ini khusus orang Jakarta kalau CTN khusus orang jawa timur kebanyakan orang-orang tersebut yaitu

menguasai Ilmu Agama terus anaknya diajar ngaji, tentangnya, sanak familinya terus kejawa terus turun temurun begitu adanya atau lahirnya ulama diKecamatan Sukoharjo. Bisa dibbilang Keputran tempat tinggal Pak Sutarto basisnya ulama karena saking banyaknya ulama karena mayoritas anak pondok semua. Dan Pak Tarto ini sebgai ketua MUI Kecamatan Sukoharjo kelahiran di Ulubelu Kecamatan Tanggamus Sebelum Merdeka pindah kesukoharjo dahulu sekolah di desa sukoharjo 1 berdekatan dengan jembatan Sikampung ini, jadilah ulama berdakwah ngajar ngaji akan melahirkan generasi ulama baru terus kejawa kembali pesantren mengembangkan ulamanya terus seperti itu dari generasi kegenerasi sejaarah ulama disukoharjo.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERAN ULAMA DALAM
PRAGMATISME POLITIK PADA PILGUB 2018
(Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)

A. Bentuk-Bentuk Pragmatisme Politik Pada Pilgub 2018 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

Pemilihan langsung kepala daerah (pilkada langsung) merupakan kerangka kelembagaan baru dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya pembajakan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat.⁴¹ Meskipun makna langsung di sini lebih berfokus pada hak rakyat untuk memilih kepala daerah, para calon kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh partai politik. Belakangan calon perseorangan memang dimungkinkan dalam pilkada, namun hal tersebut tidak begitu sajamampu mengesampingkan posisi dan peran partai politik di dalam pilkada langsung.

Dalam rangka itu, pilkada langsung juga sebagai ajang bagi daerah untuk menemukan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas dan bisa mengemban amanat rakyat. Pilkada langsung berpeluang mendorong majunya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat daerah sekaligus menguatkan derajat legitimasinya. Dengan demikian, pilkada langsung dapat memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi

⁴¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h 183

proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Artinya, masyarakat berkesempatan untuk terlibat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kepala daerah sebagaimana janjinya saat kampanye dan ikut pula mengawasi kepala daerah jika menyalahgunakan kekuasaan sehingga proses ini dapat memaksa kepala daerah untuk tetap memperhatikan aspirasi rakyat.⁴²

Pragmatisme politik merupakan hal yang sangat merugikan karena hal ini akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang akan memunculkan stigma baru bahwa semua politikus hanya akan membuat janji-janji palsu yang hanya digunakan pada saat kampanye saja, dan masyarakat mulai tidak peduli dengan politik di Indonesia yang telah diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan tetapi mengatasnamakan pemerintah.

Firman Allah dalam QS An Nahl ayat 90-91 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (90).

⁴² Djohermansyah Djohan, “Masalah Krusial Pilkada”, dalam dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi (Ed), Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan, (Jakarta: IIP Press, 2005), h. 36-37

dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (91).

Orang pragmatis karenanya, tidak banyak yang punya panggilan untuk peduli dengan orang lain. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana ia memupuk keuntungan untuk dirinya sendiri. Karena orang pragmatis ini hidup di tengah masyarakat, maka ia akan mudah untuk memperlihatkan diri sebagai orang yang peduli, meskipun kenyataannya tidak demikian. Orang seperti ini akan dengan gampangya mengelabui orang lain dengan perilakunya. Ibaratnya, ia punya hati serigala, tetapi berbulu domba. Itu semua dilakukan karena orientasinya sudah pada kekuasaan. Yang terjadi kemudian adalah bagaimana memenangkan kompetisi untuk meraih kekuasaan tersebut. Soal apakah kekuasaan itu digunakan untuk memakmurkan rakyat atau tidak, itu soal nanti. Jika pragmatisme elite politik tersebut di atas benar-benar terjadi, sangat sulit ditemukan pimpinan yang memang memperhatikan kepentingan rakyatnya dan janji politik hanya sebagai bumbu-bumbu kebohongan yang digunakan untuk mengelabui masyarakat.

Dalam kehidupan politik di Indonesia, seringkali pemimpin dianggap sebagai sosok yang menjadi panutan, dicontoh, dan diteladani. Perubahan politik, ekonomi, dan sosial juga tergantung para pemimpin itu. Maka lewat tangan pemimpinnya berbagai perubahan yang baik di masa datang diletakkan, begitu juga sebaliknya. Jika bangsa ini tidak menginginkan pragmatisme melanda mereka, para elite politik juga perlu memberikan contoh yang baik.

Jabatan kepemimpinan, dalam ajaran Islam jabatan merupakan suatu amanah yang diberikan Allah kepada manusia. Dalam kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberikan jabatan oleh Allah SWT sebagai pemimpin bagi makhluk-makhluk lainnya (Q.S. al-An'am:165). Setiap manusia pada dasarnya adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan mempunyai potensi menjadi pemimpin bagi orang lain. Semakin tinggi status jabatan maka semakin besar pula tanggung jawab yang diemban.⁴³ Akan tetapi sayangnya praktis pelaksanaan etika politik nampaknya masih nirkeadilan dan nirkemakmuran rakyat. Kebanyakan politisi masih dikuasai hasrat berkuasa ketimbang sebagai “penyambung lidah” dan penyalur inspirasi rakyat. Tanpa ada beban moral sedikitpun, mereka kerap melupakan begitu saja janji-janji kampanye setelah berkuasa. Pada titik ini masyarakat dibuat kecewa, sinis dan skeptis dengan politik.⁴⁴

Al Qur'an Surat An Nisa ayat 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari

⁴³ Abdul Malik Ghazali, Subhan Abdullah Acim. "KRITERIA PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF HADITS" *Istinbath Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* ISSN 1829-6505, Vol. 17, No. 1. p. 1-258 Hosting: <http://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi>

⁴⁴ Sidi Ritaudin, *Etika Politik Islam*, (Lampung: Fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 99

kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

Allah SWT dalam QS An Nisa aya 135 menerangkan bahwa sebagai manusia harus senantiasa bersikap jujur dan berada pada jalan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Sikap pragmatis merupakan hal yang dilarang Allah SWT karena kecenderungan perubahan pola pikir masyarakat pemilih dari idealis ke pragmatis seperti fenomena yang terjadi dalam pilkada dan pemilu, disinyalir karena reaksi atas kenyataan yang terjadi. Kasus korupsi yang menjerat sejumlah wakil rakyat dan kepala daerah selama ini, baik di tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten, mengubah pola pikir masyarakat bahwa jabatan wakil rakyat itu diperebutkan untuk meraih

Pragmatisme dalam politik membuat idealisme dan ideologi menjadi sesuatu yang basi. Politisi atau parpol yang menganut pragmatisme ini menjadikan politik sebagai panggung sandiwara. Pragmatisme juga membuat politisi dan parpol tuna identitas. Yang kemarin menjadi lawan, hari ini bisa menjadi kawan. Jika kemarin tampak berseteru, hari ini bisa dengan penuh senyum berangkuhan dan bergandengan erat. Koalisi pun bisa dijalin dengan siapapun, tidak lagi memperhatikan visi dan ideologi, selama semuanya dipertemukan oleh manfaat bersama. Padahal kenyataannya Demokrasi pancasila yang dimunculkan adalah demokrasi berdasarkan paham kebersamaan dan kekeluargaan, substansi dari demokrasi model ini adalah sikap kritis terhadap kebijakan penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan politik dan kebiasaan tolong menolong

atau gotong royong.⁴⁵ Namun hal ini sepertinya belum terbentuk sempurna mengingat masih banyak celah ketidakadilan dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Pada kasusnya bentuk-bentuk pragmatisme politik yang terjadi di Kecamatan Sukoharjo ialah:

1. Money Politik (Suap)

Money politik atau politik uang terjadi di Pemilihan Gubernur Kecamatan Sukoharjo. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh oleh satu warga Sukoharjo, berikut kutipannya.

“Kalau pilihan sudah pasti punya ya, entah ada kontribusi uang maupun sembako yang diberikan pasangan calon sebagai bantuan, jadi memilih gubernur juga bukan karena dia kasih ini kasih itu, tapi ya lebih kepada apa aja yang sudah dilakukan pada kepemimpinan dia sebelumnya dan rekam jejak nya dalam kontribusi di masyarakat ya.”⁴⁶

Meskipun tidak secara gamblang mengungkapkan telah menerima uang dari salah satu paslon, warga tersebut tidak menampik adanya pemberian “hadiah” dalam rangka mengajak warga untuk memilih dan mencoblos salah satu pasangan calon.

Berikut pernyataan salah satu Politikus PDIP

“Tidak hanya praktik money politics yang terjadi secara luar biasa, terstruktur, sangat sistematis, dan menyebar di tengah masyarakat secara masif (TSM). Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh korporasi raksasa di Lampung untuk melakukan kontrol atas tanah dan mengisap kekayaan Lampung telah membunuh demokrasi.”⁴⁷

⁴⁵ Agustam, “Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia”. *Jurnal TAPIs*, Vol.7 No.12 (Januari-Juli 2011)

⁴⁶ Wawancara pribadi dengan Herman salah satu warga kecamatan Sukoharjo

⁴⁷ Idham Samawi dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Senin (2/7/2018). <https://news.detik.com/berita/4094088/pdip-money-politics-di-pilgub-lampung-terstruktur-dan-sistematis>

Idham, telah melaporkan 16 kasus dugaan *money politics* di Lampung. Namun tak ada tindak lanjut berarti dari pihak yang berwenang. Anggota DPR F-PDIP dari Lampung, Endro Suswantoro, menyebut pihak yang berwenang tahu dan melakukan pembiaran praktik *money politics*.

"Praktik politik uang terjadi secara luas. Contoh praktik money politics di Pekon Kresno Mulyo, Ambarawa, Pringsewu, Cimanuk, Way Lima, Pesawaran, Pekon Sinar Betung, Pekon Singosari, Talang Padang, Tanggamus, yang dilaporkan masyarakat ratusan amplop masing-masing berisi 50 ribu rupiah. Masih banyak lagi money politics di masyarakat yang tidak dilaporkan dan penyelenggara pemilu tahu dan membiarkan"

Uang adalah sumber daya paling dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya yang menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver Individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang merupakan menjadi salah satu faktor urgen yang berguna untuk mendorong personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan suatu wacana strategis terkait dalam sebuah kepentingan di dalam politik dan kekuasaan. Karena dasarnya, politik adalah seni. Dimana seseorang leluasa mempengaruhi dan memeaksakan kepentingan yang ada dalam pribadi seseorang dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai saran termasuk uang.

Sehingga uang adalah salah satu modal politik seseorang dalam mencapai suatu kekuasaan dan uang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menghasilkan kekuasaan politik dengan cara melakukan praktik politik uang untuk mendapatkan suara terbanyak maka uang yang merupakan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dijadikan alat untuk mendapatkan keuntungan dalam mendapatkan kekuasaan tersebut.

Dimana hal ini dianggap sudah umum dikalangan masyarakat. Sulit untuk menghilangkan kebiasaan ini dikarenakan pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa itu merupakan resiko ketika akan mencalonkan diri sebagai wakil daerah. Ada harga yang harus dibayar untuk itu. Meskipun ada juga sebagian masyarakat yang mendukung salah satu pasangan calon dengan sukarela, akan tetapi hal ini tidak sebanding dengan minat masyarakat yang memilih karena diberi imbalan. Hal ini dilakukan oleh hampir setiap pasangan calon dan bukan sebuah rahasia besar lagi.

2. Calon dengan Pendanaan Tertentu

Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang di lakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dengan harapan agar masyarakat memilih pasangan tersebut dikarenakan pasangan tersebut telah mau memberikan bantuan dalam menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai dibangun.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh oleh satu warga Sukoharjo, berikut kutipannya:

“Beberapa memang memberikan dana untuk pembangunan masjid dan mushola, tapi itu kami anggap sebagai sumbangan sukarela yang diberikan ya, tidak juga semata-mata dikarenakan pemberian itu langsung mendukung pasangan calon tersebut”⁴⁸

Meskipun begitu, Masyarakat tak jarang mendukung pasangan calon yang memiliki janji pemberian dana setelah menang dalam pemilihan

⁴⁸ Wawancara pribadi dengan Herman salah satu warga kecamatan Sukoharjo

umum. Padahal dalam hal ini dana yang diharapkan cair ialah uang rakyat yang tentunya harus digunakan untuk kepentingan bersama. Tapi tak jarang pola pemikiran untuk menggunakannya guna kepentingan pribadi dan sebagai janji terhadap para sukarelawan menjadi ladang untuk terjadinya praktek korupsi.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh oleh satu warga Sukoharjo, berikut kutipannya:

“Kalau pilihan sudah pasti punya ya, entah ada kontribusi uang maupun sembako yang diberikan pasangan calon sebagai bantuan, jadi memilih gubernur juga bukan karena dia kasih ini kasih itu, tapi ya lebih kepada apa aja yang sudah dilakukan pada kepemimpinan dia sebelumnya dan rekam jejak nya dalam kontribusi di masyarakat ya”⁴⁹

3. Pembagian Sembako

Pembagian bahan pokok juga disinyalir merupakan salah satu bentuk dari politik uang. Bahkan masyarakat menganggap bahwa hal ini sangat lumrah terjadi. Serangan fajar adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk Politik uang dalam rangka untuk membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan salah satu calon yang akan menduduki suatu posisi sebagai pimpinan politik pada pagi hari sebelum pelaksanaan pemilihan umum dilakukan. Serangan fajar umumnya menyasar kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum. Bentuk praktik politik uang yang dilakukan adalah dengan cara membagi-bagikan uang menjelang hari pemungutan suara dengan tujuan masyarakat memilih partai atau kader

⁴⁹ Wawancara pribadi dengan Herman salah satu warga kecamatan Sukoharjo

tertentu. Politik uang (Money Politics) paling rawan terjadi pada saat menjelang pencoblosan yaitu pemberian uang maupun barang pada saat subuh atau dini hari dengan mendatangi rumah-rumah penduduk yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu calon pada saat memilih di TPS.

Mobilisasi Masa Mobilisasi massa adalah salah satu bentuk pertukaran ekonomi yang sederhana. Kandidat/partai dengan cara membeli dan warga/pemilih yang menjual suaranya. Pembelian suara dapat diartikan juga sebagai memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih dengan tujuan untuk mendukung suatu kandidat/partai tertentu. Jual beli juga bisa dilakukan antara kandidat/partai dengan para penyelenggara pemilihan. Pemberian uang dimaksudkan sebagai imbalan atau insentif untuk memanipulasi hasil pemilu. Sehingga dalam pemilihan umum itu kandidat tersebut dapat memperoleh suara masyarakat banyak dengan memobilisasi masyarakat.

B. Peran Ulama dalam Menghadapi Pragmatisme Politik Terkait Pemilihan Gubernur 2018 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

1. Peran Ulama dalam Politik di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia. Hal ini berdasarkan data dari *The Pew Forum on Religion & Public Life*, sebuah lembaga riset global pada tahun 2012. Penganut agama Islam di Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia. Jumlah itu merupakan 13,1% dari seluruh umat

muslim di dunia.⁵⁰ Dengan jumlah penduduk muslim yang besar menyebabkan peran ulama sebagai tokoh agama dalam Islam menjadi krusial.

Dalam Islam ulama memiliki kedudukan mulia. Secara etimologis ulama berarti seseorang yang memiliki ilmu dan pengetahuan agama yang mumpuni. Secara terminologis Al Qur'an menyebut ulama sebagai sosok yang memberi pencerahan pada umat manusia. Dengan segala hal tersebut wajar saja jika ulama memiliki kedudukan yang strategis dalam masyarakat. Semua yang diucapkan dan dilakukan menjadi sorotan termasuk sikap dalam pilihan politiknya yang sangat mungkin mampu mempengaruhi pilihan politik masyarakat luas.

Ulama adalah mereka yang mempunyai kelebihan atau ahli dalam bidang ilmu dalam agama yaitu agama islam, seperti ahli dalam tafsir ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa arab dan yang lainnya seperti saraf, nahwu, balagh dan masih banyak lainnya terutama dalam bidang ilmu agama islam. Membimbing umat islam baik dalam masalah agama maupun dalam masalah sosial yang diperlukan baik dari sisi keagamaan ataupun dalam lingkungan masyarakat. Karena pada dasarnya ulama juga berperan sebagai pembimbing moral⁵¹. Ulama, dalam tradisi pesantren sering dipanggil dengan Kiyai, buya ataupun syekh, dipercayai sebagai orang terpilih yang

⁵⁰ Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia" (Online), tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

⁵¹ Muhtarom, *Refroduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2005), h.12

tidak hanya mampu mentransformasi nilai-nilai Islam ke dalam dada para santri. Tapi juga menanamkan semangat jihad dalam membela Islam, dan negara. Semangat ini kemudian yang mampu mengerakkan, dan menjadikan santri tidak hanya sebagai kaum terpelajar dan mendalami Islam, tapi sewaktu-waktu mereka mampu menjadi singa dan berada di barisan terdepan dalam membela Islam dan negara.⁵²

Pembahasan mengenai ulama dalam kancah politik bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, sejak dulu terutama dalam masa orde baru ulama memiliki peran penting yang digunakan sebagai stempel dalam melegitimasi aturan hukum dan kebijakan politik. Pertanyaan yang muncul ialah apakah ulama akan selalu menjadi legitimasi sang penguasa yang dahulu juga pernah terjadi pada saat berlangsungnya “Demokrasi Terpimpin”. Sejarah menunjukkan bahwa ulama tampak lebih cocok dalam posisi itu. Peran dalam memberikan legitimasi politik tersebut yang minim resiko bagi eksistensi dan legitimasi ulama di mata umatnya.

Setelah berkembangnya waktu dan era reformasi dimana dulunya ulama hanya berada dibelakang layar untuk menarik simpati masyarakat kini ulama semakin menonjol dengan langsung terlibat menjadi pejabat publik.

Sebagian masyarakat ada yang pro dan kontra akan keterlibatan ulama dalam perpolitikan di Indonesia. Ulama dalam kaitan peran politik

⁵² Dinul Husnan, dkk. "Ulama, Islam, dan Gerakan Sosial-Politik: Reposisi Ulama dalam Gerakan Sosio-Politik Islam Indonesia" *FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, no. 1, 2017 P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup – Bengkulu Available online: <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JF> p-ISSN 2548-334X, e-ISSN 2548-3358

tidak didahului dengan diskusi dan wacana yang jelas meskipun dalam tataran empiris peran ulama dalam politik tidak terbantahkan. Akan tetapi secara normatif sebenarnya ulama seharusnya bersih dan steril dari politik dan lebih bergerak pada bidang tafsir agama.

Berkaitan dengan hal tersebut KH. Sutarto Idris selaku ketua MUI Kecamatan Sukoharjo menyampaikan pendapatnya mengenai keterlibatan ulama dalam politik:

“Menegenai ulama yang terjun kepolitik ya sah-sah saja toh memang sudah diatur di negara kita. Hak politik itu dimiliki oleh setiap warga negara. Dari manapun latar belakang orang tersebut baik ulama, petani, karyawan, buruh dll selama memenuhi syarat menjadi wakil rakyat tentunya ikut serta dalam politik bukan merupakan hal yang dilarang”⁵³

Peran serta ulama di politik bukan sebuah rahasia lagi. Hal ini tidak terlepas dari hak warga negara yang memang diperbolehkan untuk berkecimpung dalam dunia politik. Akan tetapi dalam hal ini politik yang diterapkan diharapkan bukan politik praktis yang mengarah pada pragmatisme politik, akan tetapi harus berlandaskan kepada ideologi Pancasila dan memegang teguh kebhinekaan serta membawa perubahan kearah yang lebih baik bagi kesejahteraan rakyat. Hal inilah yang menjadi tujuan dari sebagian besar ulama yang memutuskan untuk bergabung dalam dunia politik, dimana tujuannya ialah melakukan perubahan secara struktural dan luas dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Sebagian masyarakat setuju akan hal ini tapi sebagian lagi merasa bahwa ulama lebih cocok untuk mendalami ilmu agama tanpa ikut campur tangan dalam dunia politik, hal ini tergantung dengan perspektif masing-masing.

⁵³ Wawancara dengan narasumber KH. Sutarto Idris

2. Pandangan Terhadap Keterlibatan Ulama dalam Pemilihan Gubernur 2018

Pemilihan langsung kepala daerah (pilkada langsung) merupakan kerangka kelembagaan baru dalam rangka mewujudkan proses demokratisasi di daerah. Proses ini diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya pembajakan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, pilkada secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada rakyat.⁵⁴

Masih menjadi topik hangat untuk dibahas mengenai penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di berbagai tempat secara serentak di Indonesia yang merupakan hajatan lima tahunan yang menjadi daya tarik tinggi bagi pelaksanaan pesta demokrasi yang tak jarang juga melibatkan tokoh-tokoh penting di masyarakat yakni tokoh agama, tokoh adat dan para ulama.

Tugas mulia lain daripada para ulama ialah menjaga akhlak masyarakat. Pengetahuan dan pendalaman tentang ajaran agama yang dimilikinya memungkinkan para ulama bertindak selaku kekuatan moral. Dan jika kita kaji dengan teliti ketentuan al-Qur'an tentang mereka yang mendalami agama, kita dapatkan antara lain tugas mereka selaku pemberi peringatan kepada masyarakat agar mereka tetap bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi laranganNya.⁵⁵

⁵⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 183

⁵⁵ *Jurnal Dialog Peradaban*. Volume 6, Nomor 2, Januari - Juni 2014 Diterbitkan Oleh Nurcholish Madjid Society (Ncms) Sekretariat: Nurcholish Madjid Society Graha Str, Lt. 4, h. 29

Clifford Geerts seorang antropolog menyebutkan ulama sebagai *cultural broker* (perantara budaya) yang dalam hal ini dapat diidentifikasi menjadi empat hal utama. Yang pertama peran ulama dalam mengajarkan ilmu agama. Kedua sebagai *problem solver* yakni persoalan sosial. Ketiga peran ulama sebagai *agent of control* dari gerak laju perkembangan sosial dan kehidupan masyarakat dan yang terakhir adalah sebagai katalisator yakni penghubung dari perubahan sosial itu sendiri.⁵⁶

Keterlibatan ulama dalam politik digolongkan menjadi beberapa kelompok yakni ulama yang mendukung politik secara praktis, supporter (hanya sebagai tim sukses), atau sekedar guru spritual yang memberikan doa restu (*invisible hand*) serta ulama yang hanya berfokus pada kajian pendidikan dan sosial yang hanya sebagai pengontrol jalannya pesta demokrasi.⁵⁷ Karena pada dasarnya ulama harus mampu menguasai ilmu politik meskipun tidak terlibat secara langsung agar terhindar dari tipu daya politik yang menyebabkan ulama menjadi korban kekuasaan dan di politisasi oleh golongan tertentu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat padahal hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Ulama yang sampai saat ini tidak mendukung kepentingan politik golongan tertentu dan menjaga jarak dari politik praktis kekuasaan sudah jarang ditemui. Dimana hal ini perlu diapresiasi sebagai bentuk kekonsistenan dari ulama itu sendiri yang menyebabkan masyarakat menjadi lebih percaya akan

⁵⁶Geertz Clifford, *The Religion of Java*, (Amerika Serikat: The Free Press , 1960)

⁵⁷Muhammad Amin MS. *Mengislamkan Kursi dan Meja; Dialektika Ulama dan Kekuasaan. erjasama Pustaka Pelajar (Yogyakarta) dengan YLKPN (Pekanbaru)*Cetakan: Pertama, Januari 2009.

legitimasi dan komitmen dari ulama dibandingkan ulama yang terjun ke politik langsung karena secara tidak sadar mampu melemahkan kharisma dan legitimasi ulama.

Keterlibatan ulama dalam suatu proses demokrasi tidak lepas dari mayoritas masyarakat Indonesia yang beragam Muslim. Mereka menganggap bahwa pilihan ulama tersebut ialah yang paling benar karena ulama telah mengetahui seluk beluk dari konsep agama dan ilmu keduniawian. Akan tetapi hal ini akan berdampak buruk bila ulama malah terjun dan terjerumus dalam pragmatisme politik, yakni politik dengan kepentingan pribadi guna memperkaya diri serta menggunakan segala macam cara untuk bisa menggapai apa yang dia inginkan bukan untuk kepentingan masyarakat akan tetapi untuk dirinya pribadi.

KH Basori menegaskan bahwa keterlibatan ulama dalam berpolitik itu hal yang wajar baik hanya menjadi tim sukses salah satu pasangan calon atau terjun langsung menjadi pelaku dengan mencalonkan diri sebagai calon pemimpin karena pada dasarnya berpolitik merupakan hak dari setiap warga negara tidak peduli apapun profesi yang mereka miliki. Hal ini akan sangat rancu jika keterlibatan ulama justru di permasalahakan karena sejatinya akan merusak tatanan demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945. Meskipun tidak terlibat secara langsung akan tetapi KH Basori menegaskan bahwa sebagai seorang ulama penting untuk tetap mengetahui berbagai kajian politik yang ada agar tidak diperdaya oleh pragmatisme politik yang saat ini marak terjadi. Seorang ulama harus memiliki pengetahuan luas dan terbuka terhadap politik.

KH Basori menerangkan bahwa ulama bisa saja berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Ulama sebagai tokoh yang sejatinya menjadi panutan dan contoh masyarakat harus tetap berpegang teguh pada keyakinan untuk menjalankan segala sesuatu demi kepentingan umat. Menurut penuturan KH Sutarto Idris dalam pemilihan gubernur beliau memilih secara sukarela dan tidak menjadi anggota tim sukses paslon tertentu. Pendidikan politik tentu diberikan tapi hanya sebatas pada keluarga dan kerabat dekat. Penyampaian politik dalam ranah publik diperbolehkan akan tetapi harus sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan Bawaslu hal ini digunakan untuk mencegah kecurangan dalam pemilihan umum.

Seperti kita ketahui bahwa ulama masih memiliki kharisma yang kuat dalam masyarakat. Ulama masih menjadi patokan dan tuntunan yang berperan sebagai guru. Ulama dalam hal ini masih di junjung tinggi dalam tatanan masyarakat dimana dapat menjadi sosok yang ideal dalam jabatan struktural ataupun kultural. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu warga desa Sukoharjo saat diwawancarai pada saat penelitian ini berlangsung. Berikut kutipannya:

“Wakil nomor urut 4 saya sangat kenal dengan beliau, sosok ustad yang saya kagumi kepribadian dan kekokohan prinsipnya. Setuju dengan peran ulama yang menduduki kursi pemerintahan karena ulama juga Warga negara yang punya hak politik untuk dipilih dan memilih.”⁵⁸

Pernyataan salah satu warga tentang keterlibatan Ahmad Jajuli diatas menjadi salah satu alasan mengapa ulama masih memiliki kharisma dalam menarik simpati masyarakat. Kondisi ini yang akhirnya menjadikan ulama

⁵⁸ Wawancara dengan warga Sukoharjo, Indah Puji Rahayu

sosok yang memiliki peranan yang besar dalam pola kehidupan masyarakat ataupun seluruh jajaran nya baik dalam bidang agama yakni religiusitas maupun dalam persoalan ekonomi, sosial politik dan sebagainya.

Ulama diakui memiliki kelebihan dibandingkan dengan individu maupun kelompok masyarakat lainnya. Baik dalam ilmu maupun amal nya menjadikan sosoknya sebagai manusia yang selalu bergerak kearah lebih baik dan berpengaruh kepada yang lainnya. Sebagai masyarakat yang pandai untuk menilai sejatinya harus bisa melihat bagaimana sepak terjang ulama tersebut.

Imam Al Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumiddin* menggolongkan ulama menjadi dua jenis Ddari segi mental yang dimiliki, yakni ulama akhirat dan ulama dunia.⁵⁹ Ulama akhirat merupakan ulama yang mewariskan semangat nabi dimana ia menjadikan seluruh hidupnya sebagai "abdi" guna melestarikan nilai keagamaan dengan ilmu yang dimiliki, kedalaman ilmu yang dimiliki dijadikan sebagai sandaran untuk bisa berbagi serta menyelesaikan persoalan yang timbul di kehidupan masyarakat, memiliki jiwa yang berkharisma dan tidak mudah terombang ambing oleh arus terutama dalam perebutan sebuah kekuasaan. Berbeda dengan ulama dunia yang memprioritaskan penerapan ilmunya untuk kepentingan pribadi dan golongannya sendiri. Yaitu Ulama' yang dengan ilmunya itu ia bermaksud memperoleh kenikmatan dunia atau berkeinginan meraih jabatan

⁵⁹Penulis adalah Redaktur Pelaksana Majalah Tanwirul Afkar Ma'had Aly Situbondo. Tulisan-tulisannya sering dimuat di berbagai media seperti NU Online, ALIF ID, THE Geotimes.Com, Serambi Mata, Harakatuna dan lain-lain. "Judul Asli: Ulama Menurut Al Ghazali" (Online), tersedia di: <https://serambimata.com/2018/09/20/definisi-ulama-menurut-imam-al-ghazali/>

duniawi yang setinggi-tingginya. Allah SWT, menyebutkan sifat Ulama' dunia sebagai berikut :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ،
فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مِمَّا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya: " dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu. ⁶⁰ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima." (Q.S Ali Imran : 187)

Jika dirujuk pada pengertian Ulama' seperti yang telah kita ketahui di atas, maka sebetulnya Ulama' di dunia ini tidak termasuk kategori Ulama' lagi, sebab telah hilang sifat ketakwaan dari dirinya. Mungkin orang seperti ini lebih tepat disebut orang yang menjual belikan agama.

Menjadi keprihatinan jika peran-peran strategis para ulama dapat bergeser akibat dari keterlibatan ulama dalam politik praktis. Dalam hal ini ulama yang masuk dalam ranah politik akan gagal menjadi *agent of culture* yakni sebagai perantara budaya. Dimana dalam berbagai hal ulama secara tidak sengaja akan bergerak kearah makelar politik. Ulama memiliki modal sosial yang suaranya dipakai guna memobilisasi suara masyarakat dimana tujuannya adalah guna kepentingan politik tertentu. Menurut Herman salah satu warga di Sukoharjo bahwa secara pribadi ia berpendapat bahwa ulama

⁶⁰Di antara keterangan yang disembunyikan itu ialah tentang kedatangan Nabi Muhammad s.a.w.

yang terjun kepolitik akan kehilangan sedikit kharismanya karena yang dipandang hanya keinginan untuk menjadi politikus yang jelas-jelas memiliki banyak janji palsu yang tak terlaksana ketika sudah memenangkan pemilihan. Berikut penuturannya:

“Kalau menurut saya ulama yang jadi tokoh politik itu wajar saja. Tapi secara pribadi saya merasa bahwa ulama cukuplah menjadi tokoh agama yang memberikan ilmunya kepada masyarakat dan ummat. Meskipun ya mungkin para ulama tujuannya juga baik dan ingin memperbaiki kebijakan yang ada ya jika terjun ke politik , tapi ada saja pikiran yang negatif terlintas”⁶¹

Pergeseran peran ulama tersebut menyisakan beberapa persoalan dimana ditengah rantai jebakan politik praktis sepertinya sulit untuk ulama sebagai pengontrol, tanpa disadari ulama dijadikan sebagai kekuatan yang bergabung dengan rezim pemerintahan yang pada kenyataannya peran nya dihancurkan oleh mekanisme politik transaksional di Indonesia.

Pada kasus Pilkada tahun 2018 kemarin sempat terjadi kehebohan karena ditangkapnya salah satu calon gubernur yang diindikasi melakukan tindak pidana oleh KPK. Cukup disayangkan adalah Mustafa memilih calon wakil gubernur yang notabene dalam masyarakat dikenal juga sebagai tokoh ulama. Kasus yang menyebabkan kredibilitasnya turun tersebut juga menyita perhatian bahwa diindikasi pemilihannya untuk menggaet wakil gubernur tokoh ulama hanya sebagai alat guna mencapai kemenangan dan mendompleng suara dari kalangan muslim. Calon tersebut telah menjadi tersangka dan terbukti menerima 95 M. Jejak Mustafa terjaring OTT pada Februari 2018, didakwa diberi suap senilai 9,6 Miliar Ke DPRD untuk

⁶¹ Wawancara dengan Herman Warga Kecamatan Sukoharjo

memuluskan pinjaman daerah ke PT SMI. Dimana uang suap berasal dari rekanan yang dijanjikan proyek diantaranya dari Budi Winarto RP 5 Miliar dan Simon susilo 7.5 Miliar. Mustafa divonis tiga tahun penjara dan denda Rp. 100 Juta serta hak politik dicabut 2 tahun usai menjalani pidana.⁶²

Menurut KH. Basori keterlibatan Ahmad Jajuli dalam pemilihan gubernur kemarin sebagai hal yang biasa, beliau sudah terpilih menjadi anggota DPD RI selama dua masa periode tanpa terlibat skandal apapun sehingga dapat memegang kepercayaan masyarakat sehingga mampu terpilih kembali dalam dua masa jabatan. Yang menjadi masalah ialah ketika penangkapan yang terjadi pada Mustafa selaku calon gubernur yang mengusungnya justru mengurangi legitimasi Akhmad Jajuli dan akhirnya berdampak pada persepsi masyarakat. Mustafa menjadi salah satu calon yang pada awalnya diunggulkan hal ini juga disebabkan oleh kredibilitas Ahmad Jajuli yang menjadi wakil nya. Pasca tertangkapnya Mustafa kredibilitasnya menurun dan tergantikan oleh Nunik yang saat itu menjadi wakil gubernur Arinal. Hal ini seperti membuktikan keterlibatan ulama sebagai tokoh politik di nodai oleh kepentingan golongan guna mendapatkan suara. Karir politik Mustafa dipertaruhkan karena tersandung kasus penyuapan, meskipun pada dasarnya semua kebijakan tersebut diperuntukkan bagi pembangunan di daerahnya. Terlebih lagi Ahmad Jajuli yang terkenal sebagai salah satu tokoh ulama mendapat imbasnya. Kepercayaan masyarakat dikhianati dan menyebabkan tidak lagi terpengaruh akan dari golongan manapun tokoh politik tersebut.

⁶² Tribun Lampung, Terbit 21 Januari 2019

Berbagai resiko harus ditanggung jika ulama memutuskan terjun ke politik. Sebagian masyarakat mungkin masih percaya akan kredibilitasnya akan tetapi hal itu hanya pada titik tertentu saja. Pada dasarnya ulama memegang peranan dalam proses menarik simpati masyarakat dan sewaktu-waktu hal ini akan dimanfaatkan oleh para politikus agar apa disampaikan dapat dipercayai masyarakat.

Membawa isu agama masih sangat dimungkinkan saat ini, hal ini karena masyarakat mudah terpancing oleh isu yang sengaja dibuat untuk menggiring opini publik. Hal ini kadang dimanfaatkan oleh beberapa pihak guna membawa nama agama yang sensitif guna memberikan pendapat akan bela agama dan memancing amarah publik, yang berimbas pada masyarakat akan memilih pemimpin yang religius guna menjadi corong untuk membela agama, hal ini bukan sesuatu yang salah akan tetapi secara umum hal ini tidak bisa dikatakan sportif.

Syaifullah dalam penelitiannya di Kabupaten Sumenep Madura menyatakan bahwa kiai yang terjun ke pentas politik praktis, lebih lebih di tingkat lokal, pada umumnya tidak memiliki background teoritik maupun pengalaman dalam politik praktis yang memadai, selain itu kiai lebih diakui sebagai tokoh agama pengayom masyarakat, benteng moral dan tempat bertanya serta memecahkan masalah agama dan masyarakat. Sehingga pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kiai kerap kali terperangkap ke dalam praktek otoritarianisme.⁶³ Penelitian Agus dalam Dekarismatisasi Tuan Guru Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat juga demikian, dimana

⁶³ Syaifullah, "Politik & Kiai (Studi Tentang Keterlibatan Kiai dalam Politik di Kabupaten Sumenep)", (Tesis, Yogyakarta: Uin Sunan Kali Jaga, 2013)

Tuan Guru (Ulama) yang ingin dan/atau telah terjun ke politik membuat para pengikutnya sedikit demi sedikit pesimis, dan memandang pesona tuan guru sudah memudar karena memandang negatif hal-hal yang berbau politik. Akibatnya ketika sebagian Tuan Guru yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota Legislatif maupun kepala Kabupaten dan Daerah banyak Tuan Guru yang kalah dan berguguran meskipun ada satu, dua Tuan Guru yang terpilih.⁶⁴

Akan tetapi perlu juga diketahui bahwa ada beberapa alasan ulama kenapa mereka bisa memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Alasan pertama adalah berpartisipasi dalam politik merupakan panggilan dakwah bagi mereka. Sebagian ulama harus berpandangan bahwa menjadi sholeh sendiri itu belum cukup, sehingga perlu dilakukan dakwah agar mampu memberikan efek yang lebih luas dalam masyarakat. Para ulama menjadikan politik sebagai medan dakwah yang lebih luas guna menyampaikan bentuk kebaikan yang diharapkan akan memberikan efek positif dan nilai kebaikan dapat tertular meskipun dalam konteks politik bukan hanya kajian keagamaan.

3. Hubungan Ulama dengan Masyarakat Kecamatan Sukoharjo

Sukoharjo merupakan salah satu kecamatan di daerah Pringsewu. Kedekatan ulama sepuhdalam masyarakat terjalin dengan baik. Ulama dianggap orang yang mampu memberikan pandangan agama yang mendidik dan mampu mengarahkan masyarakat keranah religiusitas. Dalam hal ini ulama memiliki peran penting dalam kajian keagamaan dan kegiatan yang

⁶⁴ Agus Dedi Putrawan, "Dekarismatisasi Tuan Guru Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat" *In Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia.*, Vol. 5 No. 2 (Mei 2014), h. 282

dilaksanakan di kecamatan Sukoharjo. Para ulama sepuh memiliki sikap yang netral terhadap politik dan tidak memiliki niat untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur propinsi Lampung.

KH Sutarto Idris dan KH Basori merupakan ulama penting yang berkedudukan sebagai Ketua dan Wakil Ketua MUI kecamatan Sukoharjo. Wawancara yang dilakukan menerangkan bahwa keduanya memilih untuk bersikap netral terhadap kegiatan politik pemilihan gubernur. Meskipun mereka tidak menampik adanya peran ulama dalam proses demokrasi ini. Karena ulama memiliki beberapa kriteria dalam penentuan proses politik dimana ada yang netral, menjadi suporter dan menjadi pemberi doa restu saja kepada pasangan calon. Akan tetapi meskipun begitu peran ulama kebanyakan banyak yang tidak mempengaruhi pilihan masyarakat, hal ini disebabkan oleh masyarakat sudah memiliki pilihan tersendiri terhadap calon gubernur pilihannya.

KH. Basori selaku wakil ketua MUI kecamatan Sukoharjo beliau tidak berniat untuk terjun ke dunia politik secara terbuka apalagi ke arah politik praktis. Beliau hanya berusaha untuk mengontrol keadaan masyarakat tanpa menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. Akan tetapi KH Basori menegaskan bahwa sebagai seorang ulama penting untuk tetap mengetahui berbagai kajian politik yang ada agar tidak diperdaya oleh pragmatisme politik yang saat ini marak terjadi. Seorang ulama harus memiliki pengetahuan luas dan terbuka terhadap politik, hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara demokrasi memang diharuskan untuk mengadakan pemilihan umum dalam memilih seorang pemimpin yang tentunya akan memunculkan berbagai problematika perpolitikan di Indonesia.

KH. Basori menjelaskan bahwa keterlibatan dirinya dalam pemilihan gubernur ialah sebagai pengontrol terlaksanya proses kampanye yang adil dan damai. Beliau sebagai golongan netral oleh Bawaslu sebagai pengawas yang dibuktikan dengan dikumpulkannya para ulama di Bawaslu sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengawasan kampanye menjelang pemilihan gubernur. Berikut ini kutipan wawancara dengan KH. Basori :

“ Ada rapat koordinasi para tokoh agama dikumpulkan oleh Bawaslu untuk sama-sama mengawasi jalannya kampanye, seperti pelarangan kampanye di tempat ibadah, kemudian kampanye pada rapat dusun yang berlangsung. Jadi kampanye sudah harus ijin dan sesuai dengan aturan yang berlaku ”⁶⁵

4. Hubungan Politikus dan Ulama dalam Pemilihan Gubernur 2018 di Sukoharjo

Berdasarkan penuturan Aida Puspita politikus yang berasal dari PKB bahwa peran ulama penting dalam menarik simpati masyarakat. Beberapa ulama ada yang mendukung secara langsung dengan menjadi tim sukses akan tetapi ada pula yang memilih untuk tidak berkecimpung secara langsung dan hanya mengontrol jalannya pemilihan umum. Berikut ini kutipan wawancara dengan Aida Puspita:

“Ketika kami bisa memberikan keyakinan bahwa akan membawa kebijakan yang mampu memberikan manfaat kepada umat tentunya ulama akan mendukung, tapi itu tergantung prinsip masing-masing individu ya, ada yang memang ulama memberikan kesempatan untuk memilih kami secara langsung dan memberikan arahan kepada masyarakat, akan tetapi para tokoh ulama yang memang lebih senior lebih ke sikap dan prinsip yang tidak menunjukkan dukungan yang secara terbuka, hanya saja beliau para ulama mendukung apa saja program-program yang dijalankan selagi bermanfaat untuk umat ”⁶⁶

⁶⁵ Wawancara dengan KH. Basori

⁶⁶ Wawancara bersama Aida Puspita, Politikus PKB

Senada dengan apa yang disampaikan Aida Puspita, Mastur Yani yang merupakan politikus dari partai Golkar memberikan tanggapannya terkait dengan keterlibatan ulama dalam kegiatan politik. Berikut ini kutipan wawancara dengan Mastur Yani:

“Masyarakat sekarang ini sebenarnya sudah cerdas ya, mereka sebenarnya sudah tau dan sudah punya pilihan sendiri. Jadi meskipun melakukan pendekatan ke tokoh agama atau suku itu tidak terlalu berpengaruh. Lain hal jika daerah tersebut merupakan basis suara dengan ulama sebagai tokoh yang sangat penting ya. Tapi menurut saya selagi kita sebagai politikus mampu memberikan bukti nyata bukan hanya janji ya dalam prosesnya masyarakat pasti sudah tau kredibilitas kita sebagai wakil rakyat tanpa harus melakukan pendekatan berlebih pada tokoh agama karena masih ada ulama yang memang tidak mau berkecimpung dalam ranah politik dan hanya berperan sebagai pengamat dan pengontrol”⁶⁷

Hal ini tidak salah akan tetapi setelah mempelajari pola struktur kepemimpinan yang sudah lalu, kenyataannya ialah alasan untuk membela agama bukan menjadi pokok utama, yang di khawatirkan ialah ulama justru dijadikan alat yang ampuh guna memuluskan jalan para politikus untuk masuk dalam dunia pemerintahan yang sejatinya tujuan utamanya bukan untuk kepentingan masyarakat. Alasan pembelaan agama bukan juga harus dijadikan sebagai pokok utama, seperti diketahui bahwa di Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa dan agama yang notabene bukan hanya Islam. Jadi, dalam hal ini sepatutnya perjuangan para politikus bukan hanya untuk membela agama melainkan harus untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Mastur yani selaku Politikus Partai Golkar menuturkan bahwa ulama memberikan dukungan terhadap apapun program yang direncanakan. Asalkan memberikan manfaat terhadap kepentingan masyarakat. Meskipun

⁶⁷ Wawancara bersama Mastur Yani, Politikus Golkar

tidak mendukung secara terbuka, ulama memberikan kepercayaan dalam mengemban amanah tersebut. Berikut petikan wawancara yang telah dilakukan:

“Dukungan yang diberikan ulama itu ya sebagai dukungan moril ya, Ulama tidak secara terbuka dalam menyampaikan dukungan. Ada yang secara terang-terangan menyampaikan kepada masyarakat adapula yang hanya dukungan doa. Karena kami sebagai politikus tentunya berusaha untuk bisa mendapatkan dukungan dari Ulama, sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat akan niat tulus dalam membangun daerah”⁶⁸

Dalam hal ini politikus yang mencari basis dukungan kepada para ulama juga tidak sepenuhnya salah, mereka membutuhkan dukungan tersebut agar mampu memenangkan pemilihan umum yang notabene menjadi tujuan mereka. Sehingga yang menjadi patokan ialah ketelitian ulama dalam melihat gejolak politik yang ada. Ulama tidak seharusnya anti politik melainkan harus memiliki ilmu dan pemahaman yang luas agar tidak di politisasi oleh sebagian kelompok tertentu. Dukungan ulama harus pada calon yang tepat karena sebagian besar masyarakat masih mempercayai peran ulama dalam memutuskan sesuatu hal yang berkaitan dengan pandangan politik, semakin benar ulama dalam memilih maka akan berpengaruh positif terhadap pola pikir masyarakat kearah positif. Masyarakat perlu pemimpin yang baik guna mengarahkan kearah lebih baik. Ulama merupakan sosok penting dalam perkembangan kemerdekaan Indonesia, banyak tokoh Islam yang turut berjuang dalam mempertahankan dan memajukan Indonesia sehingga perannya pun tidak dapat dianggap remeh.

⁶⁸ Wawancara dengan politikus PKB Aida Puspita

5. Peran Ulama Dalam Mengurangi Pragmatisme Politik dalam Pemilihan Gubernur

Menurut pandangan Islam, politik merupakan aktifitas yang mulia. Sebab pada hakikatnya, politik (siyâsah) dalam pandangan Islam adalah ri'yah asy-syu'ûn al-ummah (pemeliharaan urusan ummat). Dan sabda Rasul “ ‘ammâ istar’âhum” menunjukkan bahwa politik itu berkaitan dengan pemeliharaan urusan rakyat, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Tugas politik yaitu pemeliharaan urusan rakyat yang menjadi tugas dan tanggungjawab khalifah, negara dan para pemimpin termasuk politisi itu, akan sempurna jika dijalankan dalam sistem kekuasaan dan negara.

Nabi mewajibkan umatnya mengangkat pemimpin bahkan dalam kelompok kecil sekalipun dalam rangka melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan jihad, menegakkan keadilan, menunaikan haji, mengumpulkan zakat, mengadakan sholat Ied, menolong orang yang dizalimi, dan menerapkan hukum hudud.

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kekuasaan penguasa merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Penguasa harus mengurus rakyatnya seperti yang dilakukan pengembala yang dilakukan kepada gembalaanya. Penguasa disewa rakyatnya agar bekerja untuk kepentingan mereka, kewajiban timbal balik kepada kedua belah pihak menjadikan perjanjian dalam bentuk kemitraan.

Peran serta ulama dalam membatasi dampak pragmatisme dalam pemilihan gubernur Lampung di Kecamatan Sukoharjo sebagai berikut:

a. Menjadi Panutan dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur

Sebagian masyarakat menganggap bahwa ulama yang tidak terjun ke politik dan hanya berfokus pada masyarakat dan pendidikan menjadi panutan dalam pemilihan gubernur. Meskipun sebagian juga tetap mementingkan pendapat pribadi dan rekam jejak sang calon pasangan.

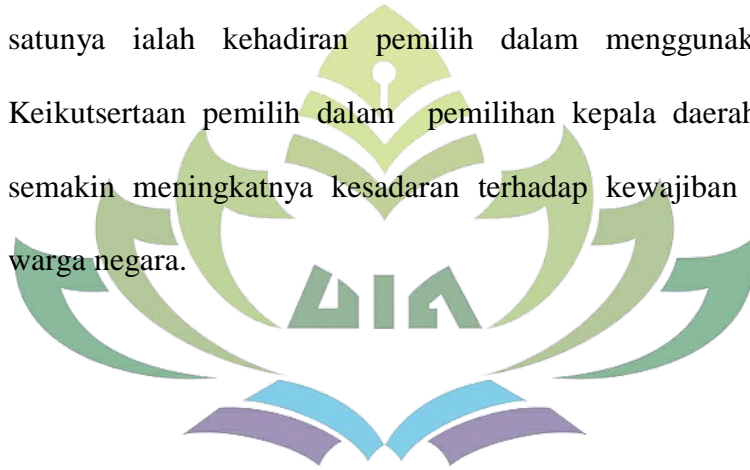
b. Pengawas Kampanye Calon Legislatif

Para ulama dijadikan sebagai kaum netral yang ikut andil dalam menjaga ketertiban pada daerahnya masing-masing. Hal ini untuk mengontrol kampanye hitam yang menginjak ke ranah agama. Seperti penggunaan tempat ibadah sebagai tempat berkampanye. Hal ini dibuktikan dengan rapat Bawaslu yang mengajak seluruh ulama untuk dapat secara bersama mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Umum.

c. Meningkatkan kesadaran pemilih dalam pemilihan umum

Peran elite agama atau kyai atau ulama dalam proses pemilu baik secara struktural tergabung dalam kelembagaan partai politik atau dalam tim pemenangan salah satu paslon merupakan warna tersendiri bagi kehidupan proses demokrasi. Karena biasanya seorang ulama hanya secara kultural saja perannya dengan memberikan legitimasi religius atau fatwa berupa dukungan formal melalui pengajian-pengajian maupun even keagamaan sangat mewarnai dinamika kehidupan politik lokal hal ini tidak terjadi di kecamatan Sukoharjo. Akan tetapi sebagian warga terpengaruh akan kesadaran memilih karena ajakan dan pendidikan politik yang disampaikan oleh ulama yang dalam hal ini bersifat netral

dan tidak memihak yang dalam hal ini mengakibatkan masyarakat memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa proses pemilihan umum harus dilakukan dengan jujur dan sukarela tanpa paksaan serta sadar akan pentingnya suara yang diberikan. Semakin menurunnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu bukanlah persoalan sepele, meskipun berapapun jumlah kehadiran pemilih akan tetap sah terhadap penentuan pemimpin, tetapi pemilu bukanlah hanya sekedar mencari pemenang belaka. Kesuksesan penyelenggaraan pemilu salah satunya ialah kehadiran pemilih dalam menggunakan hak pilih. Keikutsertaan pemilih dalam pemilihan kepala daerah menandakan semakin meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban politik sebagai warga negara.



BAB V PENUTUP

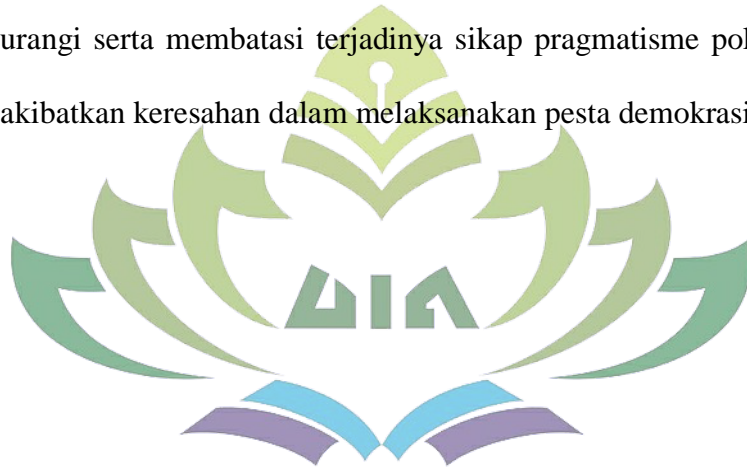
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Bentuk-bentuk pragmatisme politik yang terjadi di Kecamatan Sukoharjo meliputi:
 - a. Money Politik (Suap)
 - b. Calon dengan Pendanaan Tertentu
 - c. Pembagian Sembako
2. Peran serta ulama dalam membatasi pragmatisme pemilihan gubernur 2018 ialah:
 - a. Menjadi panutan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur
 - b. Pengawas dalam proses kampanye pada pemilihan gubernur
 - c. Meningkatkan kesadaran pemilih dalam pemilihan umum karena pada dasarnya pemilu bukan hanya sekedar mencari pemenang belaka, melainkan kesuksesan penyelenggaraan pemilu salah satunya ialah kehadiran pemilih dalam menggunakan hak pilih. Keikutsertaan pemilih dalam pemilihan kepala daerah menandakan semakin meningkatnya kesadaran terhadap kewajiban politik sebagai warga negara.

B. Rekomendasi

Penelitian ini berfokus pada satu kecamatan dan menganalisis bentuk-bentuk pragmatisme politik dalam masyarakat. Pembahasan berfokus pada menemukan masalah yang terdapat di daerah Sukoharjo dan memberikan gambaran mengenai peran ulama dalam kancah politik. Diharapkan pada penelitian selanjutnya mampu menemukan berbagai bentuk pragmatisme politik dalam ruang lingkup yang lebih luas, sehingga mampu mendeteksi pragmatisme politik dalam masyarakat sehingga dapat ditemukan solusi dalam mengurangi serta membatasi terjadinya sikap pragmatisme politik yang dapat mengakibatkan keresahan dalam melaksanakan pesta demokrasi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Adnan, Hasan Shalil Bajhatits, *Mendidik anak laki-laki ter mas'uruliyatul abi muslim fi tarbiyail waladi mathaladi attihufutallah*, cet 2, Jakarta : Gema Insani 2008.
- Al-Ghazali, Imam, *Ihya' Ulumiddin* cet 1, Semarang: CV.ASYIFA, 1990.
- Amin, MS Muhamad, *Mengislamkan Kkursi dan Meja; Dialektika Ulama dan Kekuasaan*, Yogyakarta: kerjasama pustaka belajar, 2009.
- Anwar, Rosehan dan Andi Bahrudin Malik, *Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Islam*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : suatu pendekatan praktek*, Jakarta:: Bina Aksara, Cetakan ke VII, 2008.
- B. Miler, Mathew A.A. Michael Huberman, *Analisis dan Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2001.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi Cet. I, Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama, 2008.
- Cliford, Geertz, *The Religion of Java*, Amerika Serikat: The Free Press, 1960.
- Djohan,Djohermansyah, "Masalah Krusial Pilkada", dalam dalam Djohermansyah
- Djohan, dan Made Suwandi (Ed), *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, Jakarta: IIP Press, 2005,
- El-Guyani, Gugun, *Resolusi Jihad Paling Syar'I*, Yogyakarta: PT LKS Printing Cemerlang, 2010.
- Eksan, Moch, *Kiai Kelana: Biografi KH. Muchith Muzadi*, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat 2* Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Hasan, Muhammad Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2002.
- Hbusky, Badrudin, *Dilema Ulma dalam Perubahan zaman*, Jakarta: Gema Insan Press, 1995)

Husain, Husman, Purnomo Stiady dan Amar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara 2001.

Jurdi, Fatahullah, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Ruko Jambusari 7A, 2014.

Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGafindo Persada, 2015.

Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2010.

Mubarok, M. Zak, Iim Halimatusa'diyah, *Politik Syariat Islam Idiologi dan Pragmatisme*, Jakarta : Pustaka LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Sosial, 2014.

Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Nawari, Hadari, *Metode Penelitian Bintang Sosial*, Yogyakarta: University Press, 1998.

N. Grass, W. S. Masson and A. w. Mc. Echren, Explorstion Role Analisis, Dalam David Berry, *Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Ritaudin, M. Sidi, *Etika Politik Islam*, Lampung: Fakultas Ushuludin IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Soekamto, soejono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 1997.

Syamsuddin, Ramadhan al-nawhiy Fathiy, *Menguatkan Peran dan Fungsi Ulama*.

Suprayogo, Imam, *Kiai dan Politik: Membaca Citra Politik Kiai*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:: Balai Pustaka, 1998.

Sumber Wawancara

K.H Sutarti Idris, wawancara dengan penulis, rekaman handpone, Sukoharjo, 28 Desember 2018.

K.H Basori Sarwan, wawancara dengan penulis, rekaman handpone, sukoharjo, 5 Januari 2019.

Ibu Aida Puspita, wawancara dengan penulis, rekaman handpone, Sukoharjo, 1 Februari 2019.

Mastur Yaniwawancara dengan penulis, rekaman handpone, Sukoharjo, 4 Februari 2019.

Indah Puji Rahayu, wawancara dengan penulis, rekaman handpone, Sukoharjo 7 Januari 2019.

Herman, wawancara dengan penulis, rekaman handpone, Sukoharjo 7 Januari 2019.

Sumber Internet

Ahmad Husain Fahasbu adalah Redaktur Pelaksana Majalah Tanriwul Afkar Ma'had Aly Situbondo. Tulisannya-Tulisannya serin dimuat diberbagai media seperti NU online, ALIF ID, THE Geotime.Com, Serambi Mata, Harakatuna dan lain-lain. (Judul Asli: Ulama Menurut Al-Ghazali), <https://serambimata.com/2018/09/20/definisi-ulama-menurut-imam-al-ghazali/>

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul ["Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia"], <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

Idham Samawi dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Senin (2/7/2018). <https://news.detik.com/berita/4094088/pdip-money-politics-di-pilgub-lampung-terstruktur-dan-sistematis>

Sumber Karya Ilmiah

Abdul Malik Ghozali, Subhan Abdullah Acim. KRITERIA PEMIMPIN DALAM PERSPEKTIF HADITS. *Istinbâth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* ISSN 1829-6505, vol. 17, No. 1. p. 1-258 Hosting: <http://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi>

Agus Dedi Putrawan, DEKARISMATISASI Tuan Guru Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. In *Right Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 5, No.2, Mei 2014, h.282

Agustam, Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia. *Jurnal TAPIs*, Vol.7 No.12 Januari-Juli 2011.

Dinul Husnan, dkk. Ulama, Islam dan Gerakan Sosial-Politik: Reposisi Ulama Dalam Gerakan Sosio-Politik Islam Indonesia Fokus : *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, vol.2, no. 1, 2017 P3M Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup-Bengkulu Available online: <http://journal.Staincurup.ac.id/index.php/JF> p-ISSN 2548-334X334X, e-ISSN 2548-3358

Jurnal Dialog Peradaban, Volume 6, Nomor , Januari-Juni 2014 Diterbitkan Oleh Nurcholish Madjid Society (Ncms) Sekretariat: Nurcholish Madjid Society Graha Str, Lt. 4, H. 29

Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. X, No. 1, September 2014

M. Sidi Ritaudin, Kungkungan Patologi Politik Hancurkan Budaya Luhur Bangsa. *Jurnal TAPIs*, Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012.

Syaifullah, “Politik & Kiai (Studi Tentang Keterlibatan Kiai dalam Politik di Kabupaten Sumenep)”, Tesis, Yogyakarta: Uin Sunan Kali Jaga, 2013

Syamsuddin Haris, “Mencari Model Pemilihan Langsung Kepala Daerah Bagi Pemilihan Indonesia”. Dalam Agung Djojosoekarto dan Rudi Hauter (Ed), *Pemilihan Langsung Kepala Daerah Transfprmasi Menuju Demokrasi Lokal*, (Jakarta : Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia dan Konrad Adenauer Stiftung, 2003)

Zubaedi, *Fiqh Sosial Sahal Mahfudh (Perubahan Nilai Pesantren Dalam Pengembangan Masyarakat di Pesantren Maslakul Huda Kajem Disertai Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2006.